

**PEMERINTAH  
PROVINSI RIAU**



# LKjIP 2017

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
PROVINSI RIAU**





## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 dapat diselesaikan, sebagai wujud pertanggung jawaban Pemerintah Provinsi Riau kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atas Kinerja Pencapaian Visi dan Misi Provinsi Riau yang dijabarkan melalui Sasaran Strategis Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai sarana Evaluasi terhadap Kinerja Pemerintah Provinsi Riau dan mengukur capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah selama Tahun 2017 dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun berikutnya.

Semoga dokumen ini memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja Pemerintah Provinsi Riau pada Tahun mendatang.

Pekanbaru, Maret 2018

PK. GUBERNUR RIAU



H. WAN THAMRIN HASYIM

# DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii

## BAB PENDAHULUAN

<b>1</b> 1.1 Kondisi Geografis Provinsi Riau	1
1.2 Potensi Pengembangan Wilayah	2
1.3 Susunan Organisasi	4

## BAB PERENCANAAN KINERJA

<b>2</b> 2.1 Perencanaan Kinerja	5
2.2 Isu Strategis dan Permasalahan Utama	9
2.3. Perjanjian Kinerja	12

## BAB AKUNTABILITAS KINERJA

<b>3</b> 3.1 Capaian Kinerja organisasi	13
3.2 Analisis Efisiensi	60

3.4. Capaian Kinerja Lainnya	62
3.5. Prestasi dan Penghargaan Provinsi Riau s/d 2017	65

## BAB PENUTUP

<b>4</b> 4.1. Kesimpulan	69
4.2. Strategi Untuk Meningkatkan Kinerja di Masa Mendatang	70



Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah pulau Sumatera. Riau berasal dari penuturan masyarakat setempat, diangkat dari kata *rioh* atau *riuh*, yang berarti ramai, hiruk pikuk orang bekerja. Besar kemungkinan nama ini memang berasal dari penamaan rakyat setempat, yaitu orang Melayu yang hidup di daerah Bintan, yang kini masuk wilayah Kepulauan Riau. Nama itu kemungkinan telah mulai terkenal semenjak Raja Kecil memindahkan pusat kerajaan Melayu dari Johor ke Ulu Riau pada tahun 1719.

## 1.1 KONDISI GEOGRAFIS PROVINSI RIAU

### 1.1.1 Luas Wilayah

Provinsi Riau memiliki luas 107.932,71 km<sup>2</sup> atau setara dengan 10.793.271 ha. Luas daratan sebesar 9.036.710 ha dan sisanya berupa lautan/perairan seluas 1.756.561 ha. Letak geografis Provinsi Riau yaitu pada 01°05'00" LS - 02°25'00" LU dan antara 100°00'00" BT hingga 105°05'00" BT.



Gambar 1.1.1 Letak geografis Provinsi Riau

### 1.1.2 Batasan Wilayah

Adapun batas-batas wilayah Provinsi Riau sebagai berikut :

1. Utara : Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara

2. Selatan : Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat
3. Barat : Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara
4. Timur : Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka

Provinsi Riau terdiri dari 2 Kota dan 10 Kabupaten, yaitu :

- |                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1. Kota Pekanbaru             | 7. Kabupaten Siak                  |
| 2. Kota Dumai                 | 8. Kabupaten Kampar                |
| 3. Kabupaten Kuantan Singingi | 9. Kabupaten Rokan Hulu            |
| 4. Kabupaten Indragiri Hulu   | 10. Kabupaten Bengkalis            |
| 5. Kabupaten Indragiri Hilir  | 11. Kabupaten Rokan Hilir          |
| 6. Kabupaten Pelalawan        | 12. Kabupaten Kepulauan<br>Meranti |

## 1.2. POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH

Provinsi Riau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata, industri, perkebunan dan lain-lain. Pengembangan potensi yang ada akan mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Provinsi Riau.

### ❖ PARIWISATA

Provinsi Riau memiliki daya tarik pariwisata yang dapat dikembangkan sehingga menjadi tujuan wisatawan domestik maupun manca negara. Saat ini Provinsi Riau masih mengembangkan potensi wisata secara maksimal termasuk sarana dan prasarana pendukungnya sehingga dapat menjadi tujuan wisatawan domestik maupun manca negara serta memberikan kontribusi yang berarti dalam perekonomian Provinsi Riau. Daya tarik wisata yang dapat dikembangkan di Provinsi Riau antara lain :

1. Wisata Bono, di Kabupaten Pelalawan;
2. Candi Muara Takus, di Kabupaten Kampar;
3. Pacu Jalur, di Kabupaten Kuantan Singingi;
4. Festival Bakar Tongkang, di Kabupaten Rokan Hilir;
5. Istana Siak Sri Indrapura, di Kabupaten Siak.
6. Kawasan Wisata Pulau Rupa, di Kabupaten Bengkalis.
7. Pantai Solop, di Kabupaten Indragiri Hilir.



## ❖ KAWASAN INDUSTRI

Pengembangan 2 (dua) Kawasan Industri di Provinsi Riau yang sangat perlu mendapatkan dukungan infrastruktur yaitu Kawasan Industri Tanjung Buton di Kabupaten Siak dan Kawasan Industri Kuala Enok di Kabupaten Indragiri Hilir.

## TANJUNG BUTON

1

### POTENSI PENGEMBANGAN

Pengembangan Industri Penunjang Migas  
Pengembangan Industri Hulu dan Hilir Agro  
Sebagai outlet Riau Bagian Tengah



## KUALA ENOK

2

Kuala Enok merupakan salah satu Desa yang ada di kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau,

### POTENSI PENGEMBANGAN

Shiper Ekspor dari INHU melalui Pelabuhan Dumai

- DUTA PALMA
- PT SUMBER KENCANA INHU

Shiper Ekspor dari INHIL

- PT PULAU SAMBU
- PT AGRO SARI MAS

## ❖ PERKEBUNAN

Sesuai dengan kondisi kesuburan lahan, jenis lahan dan kesesuaian iklim, maka sebagian besar lahan non kawasan hutan khususnya lahan budidaya, umumnya diusahakan untuk budidaya tanaman perkebunan disamping secara terbatas diusahakan untuk tanaman pangan. Perkebunan yang berkembang

## Kuala Enok Dapat KEK Palm Oil

■ Laporan JPNN, Jakarta

PEMERINTAH pusat berencana memberikan insentif untuk Kuala Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) bagi pengembangan *palm oil* (telapak sawit) di Indonesia.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Puan Maharini (24/11) di Jakarta. Dia mengatakan lokasi ini, lokasi yang saat ini sudah menjadi kandidat luas KEK adalah Kuala Enok, Provinsi Riau. Bahkan, pemerintah pusat sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Riau. "Nanti untuk KEK *palm oil* (telapak sawit), ujarnya.

Pemerintah pusat, Kuala Enok sangat tepat menjadi KEK berbasis *palm oil* karena memiliki pelabuhan internasional yang berbatasan dengan zona sentra perkebunan *palm oil*.

Menurut Hatta, ke depan, pemerintah sedang akan mendorong industri *palm oil* agar tidak hanya berkembang di sektor hulu atau pengolahan (perkebunan), namun juga di sektor hilir atau industri (produksi minyak goreng).

"Kalau orang mau menjual crude



PELABUHAN: Salah satu sudut petabuhan Kuala Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, yang dalam waktu dekat akan ditetapkan sebagai KEK *Palm Oil* oleh pemerintah.

(mungkin) ke perusahaan pemrosesan atau modalnya, *refi*) secara langsung ke Indonesia," kata Menteri MS Hidayat di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jalan Wahidin, di Jakarta.

Hidayat mengakui pemerintah saat ini belum memutuskan bentuk insentif yang akan diberikan. Pihaknya saat ini baru akan menetapkan lokasi-lokasi KEK yang bakal memperoleh insentif. Pemilihan lokasi-lokasi KEK pasca insentif tersebut didasarkan pada daerah yang memiliki infrastruktur relatif baik.

Menurutnya, upaya menarik investor datang (untuk menanamkan modalnya, *refi*) secara langsung ke Indonesia," kata Menteri MS Hidayat di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jalan Wahidin, di Jakarta.

Menurutnya, upaya menarik investor datang (untuk menanamkan modalnya, *refi*) secara langsung ke Indonesia," kata Menteri MS Hidayat di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jalan Wahidin, di Jakarta.

Hidayat mengakui pemerintah saat ini belum memutuskan bentuk insentif yang akan diberikan. Pihaknya saat ini baru akan menetapkan lokasi-lokasi KEK yang bakal memperoleh insentif. Pemilihan lokasi-lokasi KEK pasca insentif tersebut didasarkan pada daerah yang memiliki infrastruktur relatif baik.

Menurutnya, upaya menarik investor datang (untuk menanamkan modalnya, *refi*) secara langsung ke Indonesia," kata Menteri MS Hidayat di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jalan Wahidin, di Jakarta.

Menurutnya, upaya menarik investor datang (untuk menanamkan modalnya, *refi*) secara langsung ke Indonesia," kata Menteri MS Hidayat di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jalan Wahidin, di Jakarta.

Hidayat mengakui pemerintah saat ini belum memutuskan bentuk insentif yang akan diberikan. Pihaknya saat ini baru akan menetapkan lokasi-lokasi KEK yang bakal memperoleh insentif. Pemilihan lokasi-lokasi KEK pasca insentif tersebut didasarkan pada daerah yang memiliki infrastruktur relatif baik.

Menurutnya, upaya menarik investor datang (untuk menanamkan modalnya, *refi*) secara langsung ke Indonesia," kata Menteri MS Hidayat di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jalan Wahidin, di Jakarta.

sumber : JPNN.com

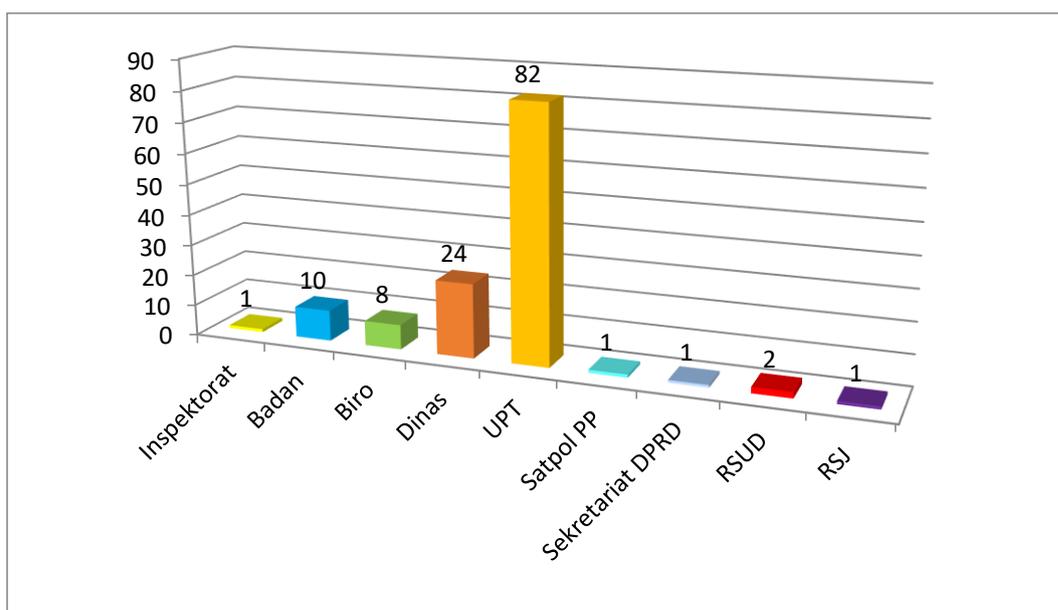
adalah perkebunan karet dan perkebunan kelapa sawit, baik itu yang dikelola oleh negara ataupun oleh rakyat. Selain itu juga terdapat perkebunan jeruk dan kelapa. Pengolahan kelapa sawit dan kelapa serta pengolahan minyak perlu dilakukan agar nilai tambah dapat diperoleh oleh Provinsi Riau. Pengembangan industri pengolahan kelapa ini tidak saja meningkatkan devisa negara dan PDRB Provinsi Riau tetapi juga akan membuka lapangan kerja dan menggerakkan industri pendukung lainnya. Pengembangan industri hilir pengolahan kelapa sawit dan kelapa di Provinsi Riau sudah menjadi kebijakan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.

### 1.3 SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH PROVINSI RIAU

Pembentukan organisasi atau kelembagaan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang kemudian ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau.

Berdasarkan peraturan tersebut, dapat dilihat jumlah lembaga pemerintah daerah Provinsi Riau sebagai berikut :

**Tabel 1.3 Jumlah Lembaga Pemerintahan Daerah Tahun 2017**



Sumber: Biro Organisasi Provinsi Riau 2017



### 2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis Instansi Pemerintah yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Rencana Strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar dalam 5 tahun ke depan mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global, namun berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan Perencanaan Stratejik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya.

Pada Bab ini menjelaskan tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Aspek Strategis dan Permasalahan Utama serta Perjanjian Kinerja sebagai referensi pengukuran kinerja pemerintah Provinsi Riau.

# BAB II PERENCANAAN KINERJA



## 2.1.1. VISI DAN MISI PROVINSI RIAU

### 1. Visi Provinsi Riau

Dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau, pemerintah Provinsi Riau menyusun visi pembangunan jangka menengah lima tahunan ketiga yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Riau Tahun 2014 s.d. 2019. Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014 s.d. 2019 yang tercantum yaitu :

“Terwujudnya Provinsi Riau Yang Maju, Masyarakat Sejahtera, berbudaya Melayu dan berdaya saing tinggi, menurunnya kemiskinan, tersedianya lapangan kerja serta pematapan aparaturnya”

## 2. Misi Provinsi Riau

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 9 (sembilan) misi Pembangunan Jangka Menengah.

### 2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Untuk tercapainya Misi yang telah ditetapkan maka dirumuskan tujuan pembangunan Provinsi Riau. Tujuan pembangunan Provinsi Riau adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan dari pembangunan akan dilaksanakan dengan cara mempertimbangkan potensi, sumber daya dan kompleksitas permasalahan penyelenggaraan pemerintahan yang ada, Pemerintah Provinsi Riau telah merumuskan sasaran strategis. Sasaran strategis merupakan prioritas pembangunan yang akan dicapai setiap tahunnya melalui pelaksanaan anggaran pembangunan Provinsi Riau. Berikut merupakan tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Riau pada setiap Misi :



1

Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur



Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur



Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dasar

2

Meningkatkan Pelayanan Pendidikan



Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan



Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan

# BAB II PERENCANAAN KINERJA



**3** Meningkatkan Pelayanan Kesehatan → Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan → Meningkatnya Kesehatan Masyarakat

**4** Menurunkan Kemiskinan → Menurunkan Kemiskinan →  
 1. Menurunnya tingkat kemiskinan dan tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat  
 2. Menurunnya angka pengangguran

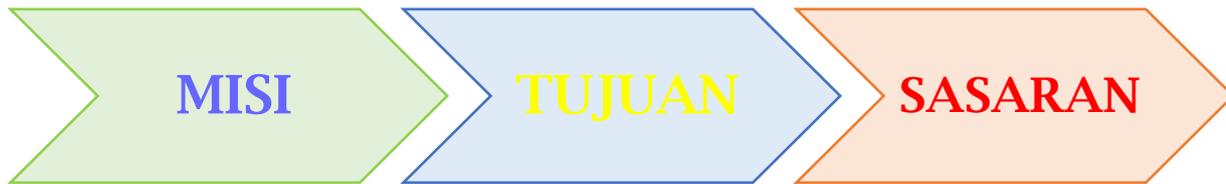
**5** Mewujudkan Pemerintahan yang handal dan terpercaya serta pemantapan kehidupan politik → Mewujudkan Pemerintahan yang handal dan terpercaya serta pemantapan kehidupan politik → Terwujudnya good governance and clean government

**6** Pembangunan masyarakat yang berbudaya Melayu, beriman dan bertaqwa → Membangun masyarakat yang berbudaya melayu, beriman dan bertaqwa →  
 1. Lestarnya keanekaragaman budaya dan kearifan lokal  
 2. Meningkatnya kerukunan hidup beragama

**7** Memperkuat Pembangunan Pertanian dan Perkebunan → Memperkuat Pembangunan Pertanian dan Perkebunan → Meningkatnya pembangunan sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, Peternakan dan perikanan)

**8** Meningkatkan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pariwisata → Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pariwisata →  
 1. Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup  
 2. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan asing

# BAB II PERENCANAAN KINERJA



Meningkatkan peran swasta dalam pembangunan



Meningkatkan peran swasta dalam pembangunan



1. Meningkatnya Nilai Investasi
2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi

## 2.2 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA

### ISU STRATEGIS

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Pemerintah Daerah yang tidak menyelaraskan diri secara sepadan atas isu strategisnya akan menghadapi potensi kegagalan dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya atau gagal dalam melaksanakan pembangunan Daerah. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis merupakan suatu keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Isu Strategis Provinsi Riau antara lain :

1. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan
2. Peningkatan Kuantitas Infrastruktur yang Berkualitas
3. Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan
4. Pengoptimalisasian Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut
5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
6. Perbaikan Iklim Usaha, Investasi dan Peningkatan Daya saing Perekonomian
7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
8. Peningkatan Penerapan Nilai Budaya Melayu dan Agama Pada Masyarakat
9. Penurunan Angka Kemiskinan dan Pengangguran



### PERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Provinsi Riau meliputi infrastruktur wilayah, lingkungan dan sumberdaya alam, ketahanan sosial dan budaya, kapasitas dan kualitas pemerintahan, kerjasama regional dan daya saing ekonomi daerah yang dihimpun kedalam 3 aspek ;

#### 1) Kesejahteraan masyarakat yang meliputi:

- Kesejahteraan dan Pemerataan ekonomi

Permasalahan utama adalah:

1. Kontribusi sektor dengan migas dimana sektor pertambangan dan penggalian harga konstandi dalam PDRB Riaumengalami penurunan dari 31,86% pada tahun 2011 menjadi 24,18% pada tahun 2015 dan turun sebanyak 7,68% atau turun 5,53% per tahun. Sementara kontribusi sektor pertambangan dan penggalian tanpa migas harga konstan turun sebanyak 1,02% atau turun dari 9,03 pada tahun 2011 menjadi 8,01%;
2. Rendahnya nilai tambah produksi sektor pertanian pada semua sub sektor (tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan serta perikanan dan kehutanan
3. Belum berkembangnya industri pengolahan hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor tersebut dengan migas.
4. Rendahnya serapan tenaga kerja dari sektor perekonomian *non-tradable*, hal ini tergambar dari kontribusi sektor jasa. Belum efektifnya pengendalian inflasi yang tercermin dari angka inflasi yang berfluktuatif, namun sudah terjadi perbaikan pengendalian angka inflasi
5. Belum efektifnya pengendalian inflasi yang tercermin dari angka inflasi yang berfluktuatif
6. Terjadinya peningkatan angka kemiskinan

- Kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga

#### Kesejahteraan Sosial

Permasalahan utama adalah :

1. Masih rendahnya IPM Provinsi Riau
2. Belum optimalnya perluasan jaringan dan perluasan lapangan kerja terdidik/terampil.



### Seni Budaya dan Olahraga

Permasalahan utama adalah :

1. Peran masyarakat dalam mewujudkan Riau sebagai pusat budaya melayu belum optimal
  2. Belum semua wilayah memiliki sarana dan prasarana pendukung pengembangan budaya melayu
  3. Penerapan nilai-nilai melayu yang Islami belum melembaga karena belum teringrasinya antara pendidikan agama dengan kurikulum yang memasukkan unsur budaya melayu dalam pembelajaran
  4. Prestasi olahraga yang belum menunjukkan pengaruh yang signifikan karena belum optimalnya pemanfaatan fasilitas olahraga
- 2) Pelayanan umum yang terdiri dari:
- a. Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar meliputi : Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, serta Sosial
  - b. Layanan Urusan Pemerintahan Wajib non Pelayanan Dasar meliputi : Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olahraga, Statistik, Kebudayaan, serta Perpustakaan
  - c. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi : Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Perdagangan, Perindustrian, serta Transmigrasi
  - d. Fokus Penunjang Urusan meliputi: Perencanaan Pembangunan, Keuangan, Kepegawaian serta Diklat, Litbang, Lainnya (Otonomi Daerah)
- 3) Daya saing daerah, aspek ini meliputi kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/ infrastruktur, iklim berinvestasi dan kualitas sumber daya manusia.

# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA



### 2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Perjanjian kinerja merupakan penjelasan lebih lanjut dari RKPD tahun 2017 dengan sasaran, indikator kinerja, dan target capaian tahun 2017. Perjanjian kinerja tersebut menjelaskan target secara kuantitatif pada setiap indikator kinerja yang akan dicapai oleh Pemerintah Provinsi Riau dalam tahun 2017.

Dokumen perjanjian Kinerja Provinsi Riau merupakan dokumen perjanjian kinerja antara Gubernur Riau dengan Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi sebagaimana terlampir dalam lampiran I.



### III.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Riau terhadap keberhasilan atau kegagalan capaian target dari indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Oleh karena itu, evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

**Tabel 3.1. Skala Pengukuran Kinerja pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	Lebih dari 100 %	Sangat baik
2	75 % sampai 100 %	Baik
3	55 % sampai 75 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA



Pemerintah Provinsi Riau tahun 2017 telah melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2017 dengan 13 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun 2017, yaitu:

**Tabel 3.2. Pengukuran Kinerja Tahun 2017**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN	REALISASI		EFISIENSI	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD	KATEGORI
							KEUANGAN	%			
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar	Persentase rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air minum	89.16%	86.687	97.23%	Rp 140.056.504.690	Rp 119.417.668.398	85,26%	14,74%	92.28%	BAIK
		panjang jalan dalam kondisi baik	1,486.68 Km	1,384	93.12%	Rp 1.296.256.773.960	Rp 1.156.179.798.211	89,19%	10,81%	84.64%	BAIK
		Rasio Elektrifikasi	82.33	83.79	101.77%	Rp 36.569.087.840	Rp 32.670.684.973	89,34%	10,66%	95.95%	SANGAT BAIK
2	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)	8.61 tahun	8,69	100,93%	Rp 1.119.820.216.283	Rp 756.948.988.879	67,60%	32,40%	99.66%	SANGAT BAIK
		Angka harapan lama sekolah	13.19 tahun	12,86	97,50%					94.14%	BAIK
3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	71.20 tahun	70,97*	99,68%*	Rp 673.560.251.047	Rp 590.959.044.316	87,74%	12,26%	99.30%	BAIK
4	Menurunnya tingkat kemiskinan dan tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat	Tingkat Kemiskinan	6.65%	7.41	88.57%	Rp 181.610.736.350	Rp 117.351.382.060	64,62%	35,38%	80.48%	BAIK
		Gini Rasio	0.35	0.325	107.14%					107.14%	SANGAT BAIK
5	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	6.85%	6.22	109.20%	Rp 1.760.481.259.003	Rp 1.444.294.690.724	82,04%	17,96%	106.89%	SANGAT BAIK
6	Terwujudnya <i>good governance and clean government</i>	Opini BPK	WTP	WTP	100.00%	Rp 952.244.052.065	Rp 364.325.276.486	38,26%	61,74%	100%	BAIK
		Nilai Akuntabilitas	BB	B	94.99%					83.02%	BAIK
		Skor LPPD	3.24	-	0.00%	Rp 452.177.110.127	Rp 414.390.468.004	91,64%	8,36%	-	KURANG

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN	REALISASI		EFISIENSI	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD	KATEGORI
							KEUANGAN	%			
		Nilai Keterbukaan Informasi	40.43%	-	0.00%	Rp 22.362.275.755	Rp 17.841.793.594	79,79%	20,21%	-	-
		Nilai Reformasi Birokrasi	38.63	52,87*	136,89%*	Rp 357.420.443.547	Rp 307.477.473.232	86,03%	13,97%	130.28%	SANGAT BAIK
7	Lestarnya keanekaragaman budaya dan kearifan lokal	Jumlah Karya Cipta Seni Budaya yang dihasilkan (HAKI Karya Seni)	30.00 Karya Seni	-	0.00%	Rp 46.141.687.967	Rp 33.926.705.966	73,53%	26,47%	0%	-
		Jumlah Sekolah yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Berbasis Budaya Melayu Sesuai Standar	50.00 Sekolah	84	168.00%	Rp 46.641.687.967	Rp 34.371.777.482	73,69%	26,31%	28%	SANGAT BAIK
8	Meningkatnya kerukunan hidup beragama	Persentase penyelesaian konflik antar umat beragama	100.00%	100	100.00%	Rp 15.402.094.752	Rp 14.192.115.573	92,14%	7,86%	100%	BAIK
9	Meningkatnya pembangunan sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan)	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	24.65%	23.96	97.20%	Rp 144.844.168.842	Rp 109.706.804.747	75,74%	24,26%	95.38%	BAIK
		Nilai Tukar Petani (NTP)	103.95	105.00	101.01%					97.35%	SANGAT BAIK
10	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	58.23	-	0.00%	Rp 76.700.298.055	Rp 66.556.884.225	86,78%	13,22%	97.35%	-
11	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan asing	Jumlah Kunjungan wisatawan asing	70,509 jiwa	98,902	140.27%	Rp 36.938.370.452	Rp 33.328.575.871	90,23%	9,77%	112.33%	SANGAT BAIK
12	Meningkatnya nilai investasi	Nilai Investasi PMDN (milyar rupiah)	Rp 10,955.61	Rp 6,744.90	61.57%	Rp 15.712.259.477	Rp 12.117.352.545	77,12%	22,88%	58.53%	CUKUP
		Nilai Investasi PMA (juta USD)	U\$ 1,015.53	1,152.02	113.44%					102.87%	SANGAT BAIK
13	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	3.39	2.85	84.07%	Rp 21.939.047.000	Rp 20.232.274.175	92,22%	7,78%	72.89%	BAIK

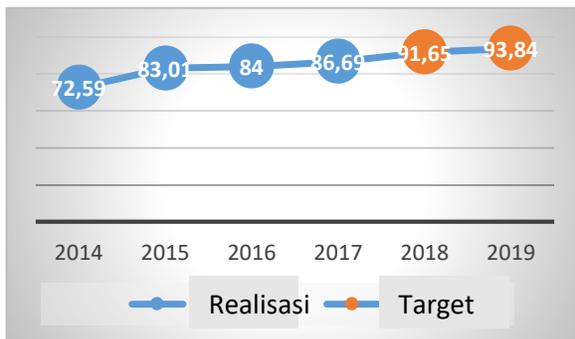
Ket : \*) Data Sementa

## SASARAN 1 : MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR

### Indikator Persentase rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air minum

Indikator kinerja Persentase rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air minum Tahun 2017 adalah 86,69% dari target 89,16% dengan capaian kinerja sebesar 97,23%. Realisasi indikator ini diukur dari perbandingan jumlah rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air minum dibandingkan dengan jumlah rumah tangga di Provinsi Riau.

**Grafik 3.14. Persentase RT yang Mendapatkan Pelayanan Air Minum (%)**



Pencapaian target ini mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar 0,98% dari 98,21% menjadi 97,23% dan telah mencapai 92,37 persen jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD yaitu 93,84%.

Kendala dan permasalahan yang mempengaruhi ketercapaian Indikator persentase rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air minum adalah sebagai berikut.

1. Masih lemahnya komitmen dan instrumen kebijakan serta strategi pembangunan air minum baik di Provinsi Riau memperparah kondisi penyediaan air minum di provinsi. Menurunnya persentase cakupan pelayanan air minum juga dipengaruhi oleh meningkatnya pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi.
2. Tidak cukupnya alokasi dana untuk pemeliharaan infrastruktur jaringan dan instalasi air minum;
3. Tidak tersedianya investasi yang signifikan untuk peningkatan kapasitas pelayanan mengakibatkan turunnya pelayanan air minum di Provinsi Riau

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA



sehingga jauh tertinggal dari apa yang telah dicapai di skala nasional.

4. Belum optimalnya manajemen pelaksanaan oleh rekanan terutama terhadap pemanfaatan waktu pelaksanaan, sehingga waktu pelaksanaan tidak efisien.
5. Kebutuhan dana belum sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan, sehingga pelaksanaan fisik tidak berkesinambungan serta sangat rentan terhadap terjadinya kerusakan-kerusakan pada bangunan yang telah dibangun pada tahap sebelumnya.

Pencapaian indikator ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui :

1. Melakukan pengembangan SPAM Regional untuk mendukung capaian air minum khususnya bagi Kabupaten/Kota yang kesulitan air baku mengingat Riau dilintasi oleh empat sungai besar (Rokan, Siak, Kampar dan Indragiri) dan anak-anak sungainya yang mengalir banyak wilayah;
2. Meningkatkan kinerja PDAM dan UPT Air Minum;
3. Meningkatkan monitoring, evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang diwujudkan dalam bentuk: pertemuan secara

periodik; *show case meeting* secara berjenjang ;

4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di lingkungan Provinsi Riau sehingga didapat kebutuhan dana yang sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai pelaksanaan fisik yang berkesinambungan dan tepat guna;
5. Mempercepat proses pengadaan barang jasa, agar waktu pelaksanaan kegiatan dapat dioptimalkan. Sehingga apabila terjadi suatu hal yang sebabkan masalah teknis dan non teknis Pengguna dan Penyedia masih memiliki waktu untuk menjadi alternatif jalan keluar yang terbaik.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian ketersediaan air minum bagi masyarakat adalah sebesar Rp 119.417.668.398,- atau 85.26% dari total pagu Rp 140.056.504.690, . Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 14,74%.

Gambar 3.1. SPAM Durolis Wujudkan Perjuangan Pemerintah Atasi Krisis Air Bersih





### Indikator panjang Jalan dalam kondisi baik

Indikator kinerja Panjang jalan dalam kondisi baik Tahun 2017 adalah 1.384,43 Km dari target 1.486,68 Km dengan capaian kinerja sebesar 93,12%. Realisasi Indikator ini diperoleh dari survey yang dilakukan terhadap Ruas Jalan Provinsi yang ada di Provinsi Riau, sehingga diperoleh panjang jalan kondisi jalan baik, sedang, rusak ringan dan rusak berat.

**Grafik 3.1. Data Kondisi Jalan Provinsi (Km) di Provinsi Riau**



Sumber : Dinas PUPPR Provinsi Riau, 2017 (diolah)

Kendala dan permasalahan yang mempengaruhi ketercapaian Indikator panjang jalan dalam kondisi baik adalah sebagai berikut.

1. Belum optimalnya manajemen pelaksanaan oleh rekanan terutama terhadap pemanfaatan waktu pelaksanaan, sehingga waktu pelaksanaan tidak efisien.
2. Kebutuhan dana belum sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan, sehingga pelaksanaan fisik tidak berkesinambungan serta sangat rentan terhadap terjadinya kerusakan-kerusakan pada bangunan yang telah dibangun pada tahap sebelumnya.
3. Adanya kendala yang disebabkan oleh fenomena alam dan perubahan iklim serti curah hujan yang cukup tinggi, banjir, longsor dan sebagainya serta pembebasan lahan yang terlambat, terjadinya kelangkaan material, berakibat terhadap percepatan pelaksanaan kegiatan sehingga beberapa kegiatan tidak dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Upaya yang dilakukan dalam rangka mengatasi kendala dan permasalahan dalam pencapaian indikator panjang jalan dalam kondisi baik adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan monitoring, evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang diwujudkan dalam bentuk: pertemuan secara

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA



- periodik; *show case meeting* secara berjenjang ;
2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di lingkungan Provinsi Riau sehingga didapat kebutuhan dana yang sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai pelaksanaan fisik yang berkesinambungan dan tepat guna;
  3. Mempercepat proses pengadaan barang jasa, agar waktu pelaksanaan kegiatan dapat dioptimalkan. Sehingga apabila terjadi suatu hal yang sebabkan masalah teknis dan non teknis Pengguna dan Penyedia masih memiliki waktu untuk menjadi alternatif jalan keluar yang terbaik.

Pencapaian Sasaran Strategis ini tidak terlepas dari pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan program Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, telah menetapkan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang Daerah untuk Pemerintah Provinsi yaitu :

- 1) Indikator persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya dengan target Tahun 2019 sebesar 70 %.
- 2) Indikator Persentase tingkat kondisi jalan provinsi baik dan sedang dengan Target Tahun 2019 sebesar 60 %;
- 3) Indikator Persentase terhubunginya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah provinsi dengan Target Tahun 2019 adalah sebesar 100 %;
- 4) Indikator persentase tersedianya 3 (tiga) jenis informasi Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) dengan target Tahun 2019 sebesar 100 %.
- 5) Indikator persentase tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Provinsi beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital dengan target Tahun 2019 sebesar 100 %.

Indikator Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik di Provinsi Riau hampir sama dengan Indikator SPM nasional yaitu Persentase tingkat kondisi jalan provinsi baik dan sedang. Pada Tahun 2017, Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik adalah 1.384,43 Km, Panjang Jalan Dalam Kondisi Sedang adalah 251,69 Km. Sedangkan panjang Jalan

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA



Provinsi adalah 2.779,81 Km, sehingga Persentase tingkat kondisi jalan provinsi baik dan sedang adalah sebesar 58,86 %. Target Akhir SPM nasional pada tahun 2019 adalah 60 %, sehingga masih ada kekurangan sebesar 1,14 % untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Realisasi Indikator Kinerja Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik pada Tahun 2016 adalah 1.264,01 Km dengan pencapaian sebesar 94,97 %. Pada Tahun 2017 realisasi kinerjanya 1.384,43 Km dengan pencapaian sebesar 93,12 %, sehingga jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 1,85 %.

Meskipun rasio panjang jalan dalam kondisi baik telah mencapai target pada tahun 2017, namun kondisi jalan yang baik hanya mencapai 46.37%.

Pemerintah Provinsi Riau lebih memprioritaskan fungsional jalan sehingga ruas-ruas jalan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan transportasi bagi masyarakat. Adapun pembangunan/peningkatan jalan pertahun adalah sebagai berikut.

- Tahun 2014 : 229,02 Km
- Tahun 2015 : 229,99 Km
- Tahun 2016 : 163,99 Km
- Tahun 2017 : 148,80 Km

dengan total pembangunan jalan sebesar 665,73 Km

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Pencapaian adalah

sebesar Rp 1.156.179.798.211,- atau 89.19% dari total pagu Rp 1.296.256.773.960,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 10.81%.

Adapun upaya yang dilakukan oleh OPD terkait dalam rangka mencapai target adalah melalui pelaksanaan program sebagai berikut :

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
2. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
3. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
4. Program Pengujian Material/Bahan Konstruksi

Gambar 2. Gubri H Arsyadjuliandi Rachman Tinjau Perbaikan Jalan saat Kunjungan Kerja di Kab Kampar



# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA



### Indikator Rasio elektrifikasi

**R**asio Elektrifikasi (RE) adalah persentase rumah tangga atau Kepala Keluarga (KK) yang telah mendapatkan akses energi listrik dibandingkan dengan seluruh Kepala Keluarga (KK) yang ada dalam suatu wilayah.

Perhitungan Ratio Elektrifikasi (RE) Provinsi Riau ini berguna untuk mengetahui sudah sejauh mana angka pemenuhan kebutuhan listrik bagi masyarakat (rumah tangga) dalam wilayah Provinsi Riau.

Tabel 3.3. Data Rumah Tangga berlistrik PLN dan Berlistrik Non-PLN Se-Provinsi Riau

No	Kab/Kota	Jumlah RT (Rumah Tangga)	Jumlah RT Berlistrik			Keterangan (Sumber Data)
			PLN	Non-PLN	Total	
1	Siak	112,613	82,728	21,076	103,804	Data PT. PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepri
2	Bengkalis	136,210	129,214	24,975	154,189	Data PT. PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepri
3	Kep. Meranti	45,712	30,413	13,871	44,284	Data PT. PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepri
4	Rokan Hilir	146,604	110,445	31,939	142,384	Data PT. PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepri
5	Rokan Hulu	144,186	94,343	19,459	113,802	Data PT. PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepri
6	Indragiri Hulu	103,468	86,316	15,323	101,639	Data PT. PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepri
7	Indragiri Hilir	182,512	89,782	19,226	109,008	Data PT. PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepri
8	Pelalawan	97,984	56,348	23,681	80,029	Data PT. PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepri
9	Kampar	197,070	200,757	3,210	203,967	Data PT. PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepri
10	Kuantan Singingi	80,864	70,882	516	71,398	Data PT. PLN (Persero)

No	Kab/Kota	Jumlah RT (Rumah Tangga)	Jumlah RT Berlistrik			Keterangan (Sumber Data)
			PLN	Non-PLN	Total	
11	Dumai	68,050	70,275	2,587	72,862	Wilayah Riau dan Kepri Data PT. PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepri
12	Pekanbaru	267731	304895	0	304,895	Data PT. PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepri
TOTAL		1,583,004	1,326,398	175,863	1,502,261	

Mulai tahun 2017, kebijakan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terkait Rasio Elektrifikasi adalah hanya memasukkan rumah tangga yang dilayani PLN dan penyedia listrik yang bersifat kontinyu. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa listrik non PLN yang misalnya berasal dari genset dan pembangkit Energi Baru Terbarukan dinilai kurang handal dan bersifat sementara. Pembangkit EBT ini hanya bisa dijadikan sebagai stimulan sebelum aliran listrik yang handal masuk ke daerah tersebut. Namun, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau tetap menginventarisir pembangkit non PLN tersebut. Jika dimasukkan dalam Perumusan perhitungan Rasio Elektrifikasi (RE), maka perhitungan RE Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah KK Pelanggan PLN}}{\text{Jumlah KK se-Provinsi Riau}} \times 100 \% =$$

$$\frac{1,326,398}{1,583,004} \times 100 \% = 83.79$$

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA



Pada akhir Tahun 2017, Rasio Elektrifikasi Provinsi Riau adalah sebesar 83,79%. Artinya masih ada sekitar 16.21 % masyarakat yang belum menikmati listrik, yang tentunya tersebar di daerah-daerah pedesaan yang jauh dari jangkauan pembangunan sarana kelistrikan. Jika dilihat dari targetnya (sebesar 82,33%), maka realisasinya sudah melampaui target (tingkat capaian kinerja sebesar 101,77 %).

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2016 dan 2017 sama-sama melebihi target yang telah ditentukan, namun tingkat capaian pada Tahun 2017 sedikit mengalami penurunan. Hal ini disebabkan pada Tahun 2016 target yang ditetapkan terlalu rendah dan pada draft revisi RPJMD sudah diusulkan perubahan target. Disamping itu, perhitungan Rasio Elektrifikasi Tahun 2016 masih memperhitungkan rumah tangga yang dialiri listrik non PLN, sedangkan di tahun 2017 sesuai kesepakatan dari Kementerian ESDM, Rasio Elektrifikasi hanya memasukkan rumah tangga yang dilayani PLN dan penyedia listrik yang bersifat handal dan kontinyu.

Rasio Elektrifikasi Indonesia per Desember 2017 sebesar 94,91%. Jika dibandingkan dengan capaian nasional, capaian Rasio Eelektrifikasi Provinsi Riau masih dibawah capaian nasional yaitu 83,79%.

Target akhir RPJMD pada Tahun 2019 untuk indikator Rasio Elektrifikasi adalah sebesar 87,33 %. Perhitungan capaian Rasio Elektrifikasi s/d Tahun 2017 terhadap target akhir RPJMD adalah 95,95 %

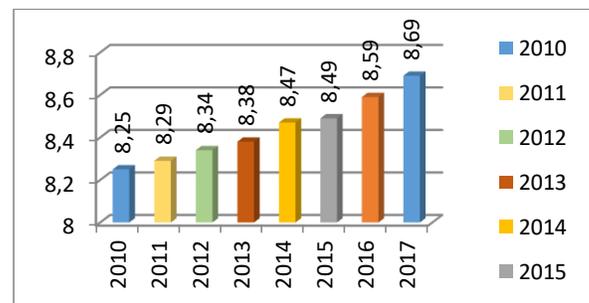
## SASARAN 2 : MENINGKATNYA AKSESIBILITAS DAN MUTU PENDIDIKAN

### Indikator Angka rata-rata lama sekolah

**R**ata-Rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standard internasional yang digunakan oleh UNDP.

Jika dilihat dari indikator angka RLS Provinsi Riau sebesar 8,69 Tahun 2017. Artinya meningkat sebesar 0,10% dari tahun sebelumnya dan telah melebihi target 8,61 pada Tahun 2017.

Grafik 3.2. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Riau Tahun 2010-2017



Sumber Data : Dinas Pendidikan Provinsi Riau, 2017

### Indikator Harapan lama sekolah

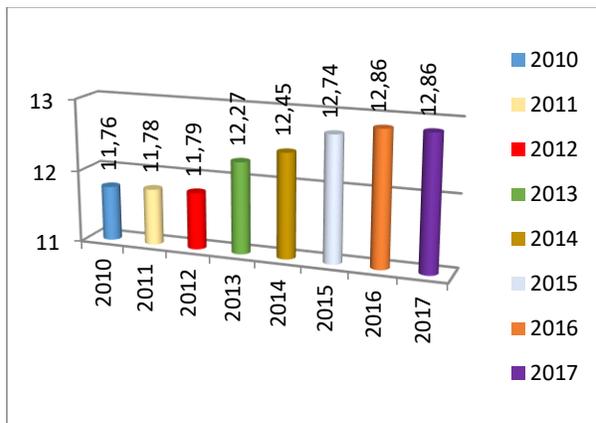
Angka harapan lama sekolah (HLS) dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 Tahun keatas karena mengikuti kebijakan pemerintah, yaitu program wajib belajar. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren, dengan Sumber data pesantren yaitu dari Direktorat Pendidikan Islam.

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA



**Grafik 3.3. Perkembangan Harapan Lama Sekolah Provinsi Riau Tahun 2010-2017**



Sumber Data : Dinas Pendidikan Provinsi Riau, 2017

Dari Diagram sebagaimana tersebut diatas, terlihat HLS di Provinsi Riau dari Tahun 2010 s.d 2017 mengalami kenaikan yang signifikan. HLS Provinsi Riau mengalami kenaikan sebesar 0,29 dari 12,45 di Tahun 2014 menjadi 12,74 di Tahun 2015, akan tetapi stagnan pada tahun 2016 dan 2017.

Dibandingkan dengan angka harapan lama sekolah nasional 12,72 pada tahun 2016, Provinsi Riau berada di atas angka harapan lama sekolah nasional yaitu 12,86 tahun.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan bagi masyarakat adalah sebesar Rp 593.227.932.086,- atau 70,41%. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 29,59%. Pencapaian

sasaran strategis ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui :

1. Memperkecil angka putus sekolah
2. Meningkatkan jumlah angka yang melanjutkan antar jenjang pendidikan.
3. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD)
4. Meningkatkan partisipasi sekolah jenjang pendidikan yang bermutu
5. Meningkatkan akses, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan menengah
6. Meningkatkan akses dan daya saing pendidikan tinggi
7. Meningkatkan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
8. Membuat perangkat atau aturan dan petunjuk teknisnya, untuk mendorong setiap warga yang berusia sekolah untuk bersekolah dan minimal dapat menyelesaikan pendidikan dasarnya

Sedangkan hambatan yang masih dihadapi dalam mencapai target tersebut adalah sebagai berikut.

1. Penduduk Riau belum 100% melek huruf
2. Beberapa ketercapaian indikator kinerja bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi melainkan tanggung jawab pemerintah daerah (Kabupaten/Kota) seperti pemenuhan SPM pendidikan dasar
3. Kurangnya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA



4. Rendahnya mutu/kualitas pembelajaran yang disebabkan karena tidak efektifnya pembelajaran, tidak efisiennya pengajaran. Nilai integritas Ujian Nasional masih dibawah Nasional
5. Mahalnya biaya pendidikan disebabkan karena rendahnya mutu pembelajaran
6. Kurangnya kompetensi dan mutu Guru. Nilai uji kompetensi guru Provinsi Riau (55,21) masih dibawah standar nasional yaitu (56,69)
7. Belum meratanya distribusi guru
8. Belum relevannya pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
9. Adanya kegiatan program peningkatan mutu pendidikan yang pelaksanaannya tidak optimal, bahkan tidak terlaksana sama sekali seperti kegiatan pelatihan kompetensi tenaga pendidik.

Mengingat terdapatnya beberapa hambatan dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, perlu langkah perbaikan/solusi yang akan dilakukan pada tahun berikutnya yaitu sebagai berikut.

  - a. Menerapkan kebijakan yang berpola rangsangan bagi masyarakat dan sosialisasi dunia pendidikan
  - b. Pemberian bimbingan melalui guru-guru sekolah bagi masyarakat dengan kelompok umur 40 tahun keatas
- c. Penyelenggaraan pendidikan yang murah dan dapat terjangkau oleh masyarakat (Riau Panutan)
- d. Penyediaan berbagai literatur ataupun referensi di dalam perpustakaan sekolah dan perpustakaan keliling
- e. Optimalisasi perpustakaan keliling dan perlombaan menulis cerita atau artikel dapat dijadikan sebagai bentuk rangsang bagi masyarakat berusia muda
- f. Pemberian beasiswa diharapkan dapat menstimulasi masyarakat di daerah untuk mau melanjutkan dan meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih tinggi
- g. Pembiayaan pendidikan terkait dukungan terhadap sarana transportasi guna mendekatkan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana pendidikan
- h. Meningkatkan strategi pengelolaan tenaga pendidik/guru (distribusi dan peningkatan kualitas guru)
- i. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi guru terutama pada mata pelajaran dengan nilai rendah

### SASARAN 3 : MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT

#### Indikator Angka Harapan Hidup

Sasaran Meningkatnya Kesehatan Masyarakat diukur melalui Angka harapan hidup. Unsur dasar pembangunan manusia yang pertama adalah Usia Harapan Hidup. Umur atau usia adalah satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan suatu benda atau makhluk, baik yang hidup maupun yang mati. Misal, umur manusia dikatakan lima belas tahun diukur sejak dia lahir hingga waktu umur itu dihitung. Oleh karena itu, umur itu diukur dari tarikh lahir hingga tarikh masa (masa kini). Usia harapan hidup menggambarkan usia maksimum yang diharapkan oleh seseorang untuk bertahan hidup. Sehingga, pembangunan terhadap manusia harus lebih mengarahkan upaya agar penduduk dapat mencapai pada usia harapan hidup yang panjang.

**Grafik 3.5. Angka Harapan Hidup Provinsi Riau (tahun), 2010-2017**



Sumber: BPS Prov Riau

Pada tahun 2016, Angka Harapan hidup Provinsi Riau sebesar 70,97 tahun dengan target 70,97 tahun, capaian yang diperoleh adalah 100%. Pada tahun 2017, Angka Harapan Hidup Provinsi Riau masih menunggu angka dari BPS. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian sebesar 99,3% dari target kinerja akhir RPJMD sebesar 71,47 tahun. Jika dibandingkan dengan Angka Harapan Hidup Indonesia pada tahun 2016 sebesar 70,8 tahun, maka Angka Harapan Hidup Provinsi Riau sedikit lebih tinggi.

**Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target adalah sebagai berikut:**

1. Pemerintah Provinsi Riau pada Tahun 2017 memberikan Bantuan Keuangan (Bankeu) kepada Kab/Kota yang bersumber dari anggaran APBD Provinsi Riau.

Bantuan Keuangan tersebut bertujuan untuk membantu pencapaian kinerja program prioritas kab/kota pada bidang kesehatan yang mendukung pencapaian target Angka Harapan Hidup. Bantuan Keuangan bidang kesehatan diperuntukkan bagi pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan seperti

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA



- Pembangunan/Rehab Peskesmas, Pengadaan Alat Kesehatan, Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), dll.
- Menjamin pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat Riau yang kurang mampu dengan penyediaan biaya Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah) di Tahun 2017 sebesar Rp. 86.109.563.546,-
  - Meningkatkan pelayanan kesehatan di tingkat Puskesmas se Provinsi Riau. Menurut Permenkes Nomor 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di tingkat

pelatihan. Pelatihan yang diselenggarakan seperti: Pelatihan keluarga sehat, Pelatihan manajemen Puskesmas, Pelatihan petugas pemeriksaan kesehatan jemaah haji (PPKJH), Pelatihan jabatan fungsional sanitarian, Pelatihan jabatan fungsional nutrisionis, Pelatihan jabatan fungsional perawat dan Pelatihan jabatan fungsional penyuluh kesehatan masyarakat.

- Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap Kab/Kota dalam rangka meningkatkan pembangunan kesehatan di Provinsi Riau.

Koordinasi pada tahun 2017 dimulai dengan Rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi Riau yang merupakan forum tertinggi pembahasan dan perumusan Prioritas Kebijakan Program Pembangunan Kesehatan yang dihadiri oleh pemangku kebijakan Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Riau, Dinas Kesehatan dan RSUD Kabupaten/Kota serta lintas sektor terkait. Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara berkala ke Kab/Kota terhadap pelaksanaan pembangunan kesehatan di Provinsi Riau.

- Melakukan pemberdayaan masyarakat dalam gerakan masyarakat hidup sehat. Pemberdayaan masyarakat terus diupayakan melalui pengembangan



- primer/dasar adalah dengan akreditasi Puskesmas, dan sampai dengan tahun 2017 sudah 94 puskesmas di 89 kecamatan yang terakreditasi.
- Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan di Provinsi Riau dengan melakukan pelatihan bidang kesehatan pada tahun 2017. Pada tahun 2017 pelatihan yang diselenggarakan berjumlah 27

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA



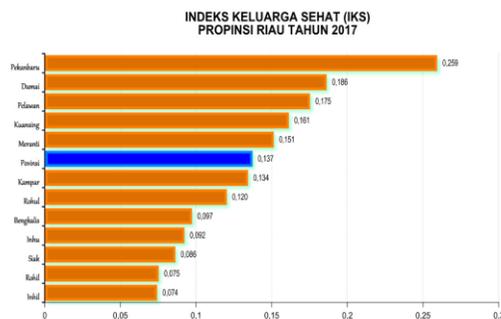
UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat) yang ada di desa/kelurahan. UKBM diantaranya adalah Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu), Polindes (Pondok Bersalin Desa) dan Desa Siaga.

akses/menggunakan jamban keluarga (93,1%) dan terendah adalah penderita gangguan jiwa berat, diobati dan ditelantarkan (8%).

### Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) wilayah dihitung dari keluarga yang telah terdata lengkap, yaitu jumlah keluarga terdata lengkap dengan IKS > 0,8 dibagi jumlah seluruh keluarga terdata lengkap di wilayah tersebut. Jumlah keluarga yang terdata pada tahun 2017 adalah 204.872. Persentase keluarga yang terdata lengkap 88,86%.

Gambar 3.5. Gubernur Riau mengunjungi pasien kanker di RSUD Arifin Achmad



Dari 12 Kab/Kota di Provinsi Riau, Indeks Keluarga Sehat (IKS) tertinggi adalah Kota Pekanbaru (25,9%) dan yang terendah adalah Kabupaten Indragiri Hilir (7,4%).

Dari 12 indikator keluarga sehat, indikator dengan cakupan tertinggi di Provinsi Riau adalah keluarga memiliki

□

## SASARAN 4 : MENURUNNYA TINGKAT KEMISKINAN DAN TINGKAT KESENJANGAN PENDAPATAN MASYARAKAT

### Indikator Tingkat kemiskinan (%)

Target Indikator kinerja tingkat kemiskinan Provinsi Riau Tahun 2017 adalah 6,65%. Sementara jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan) di Riau September 2017 sebesar 496,39 ribu jiwa (7,41 persen). Artinya target penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Riau belum mencapai target dengan persentase capaian kinerja hanya 88,57%.

**Grafik 3.6.** Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau 2012-2017



Akan tetapi, jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2016 yang berjumlah 501,59 ribu jiwa (7,67 persen), penduduk miskin di Riau mengalami penurunan sebanyak 5,20 ribu jiwa.

Pada bulan September 2017, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan

pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 26,58 juta orang (10,12 persen), berkurang sebesar 1,19 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 yang sebesar 27,77 juta orang (10,64 persen). Artinya persentase tingkat kemiskinan di Provinsi Riau lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional.

Hambatan pelaksanaan upaya menekan angka tingkat kemiskinan di Provinsi Riau sebagai berikut:

- Lambatnya pertumbuhan ekonomi
- Daya beli masyarakat menurun berakibat terhadap turunnya proses jual beli perdagangan
- Pertumbuhan penduduk yang tinggi dan tidak didukung kualitas Sumber Daya Manusia yang memadai
- Keterlambatan pembagian Beras Sejahteraan (Rastra) akibat adanya peralihan wewenang dari Kementerian kebudayaan ke dinas kementerian sosial, sehingga kabupaten-kabupaten yang melaksanakan pembagian Rastra terlambat.

Dalam upaya penurunan angka kemiskinan Pemerintah Provinsi Riau sudah

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA



memiliki aplikasi Basis Data Terpadu (BDT) Penanganan Fakir Miskin (PFM) yang dapat diakses secara online. Aplikasi ini untuk memudahkan pendataan dan penanganan kaum miskin di Riau.

Aplikasi ini dibuat untuk memberikan kemudahan akses basis data terpadu yang berisikan data keluarga penerima manfaat program penanganan fakir miskin di Provinsi Riau kepada seluruh stakeholder terkait yang melakukan upaya menurunkan angka kemiskinan di Riau.

Pada aplikasi ini tersusun basis data terpadu penanganan fakir miskin serta turunannya berupa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Beras Sejahtera (Rastra) dan KPM Program Keluarga Harapan (PKH) secara BNBA (By Name by Address) untuk seluruh kabupaten/kota di Riau.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran menurunkan angka kemiskinan adalah sebesar Rp 117.351.382.060,- atau 64,62% dari total anggaran Rp 181.610.736.350,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 35,38%.

Gambar 3.6. Terobosan baru pengentasan kemiskinan, Gubernur Riau resmikan Pos Pemberdayaan Keluarga di Kelurahan Tuah Karya



### Indikator      Tingkat      Kesenjangan

#### Pendapatan Masyarakat

Secara umum capaian Menurunnya Tingkat Kesenjangan Pendapatan Masyarakat dapat dicapai sesuai target.

Realisasi indikator kinerja Penurunan Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Tahun 2017 adalah 0,325 dari target 0,35 sehingga capaian kinerja sebesar 107,14%. Realisasi kinerja ini termasuk dalam kategori Sangat Baik karena berada dalam rentang nilai >100%.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2016 yaitu 3,5, Kesenjangan Pendapatan Masyarakat tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 0.025%.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Riau sudah mencapai target akhir RPJMD yaitu 104,41%.

# BAB III

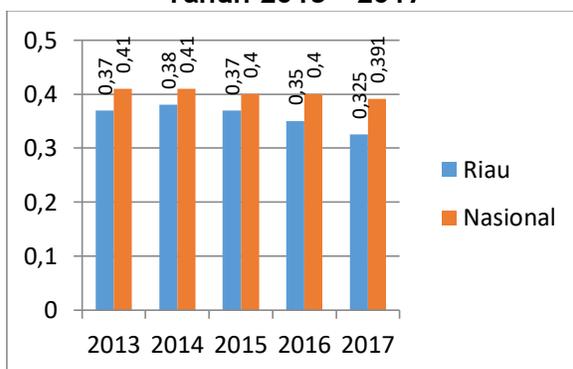
## AKUNTABILITAS KINERJA



Mengingat tipe perhitungan Kesenjangan Pendapatan Masyarakat bersifat nonkumulatif dengan kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD adalah 0.34.

Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Koefisien Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

**Grafik 3.7. Rasio Gini Provinsi Riau Dari Tahun 2013 - 2017**



Sumber : BPS Pusat, Data September 2017

Dilihat dari rasio Gini 2013, 2014 dan 2015 fluktuatif, pada tahun 2015 indeks gini rasio Provinsi Riau adalah 0,37, hal ini menunjukkan bahwa masih ada ketimpangan

pendapatan yang cukup besar di Provinsi Riau. Dilihat dari sumbernya ketimpangan pendapatan berasal dari kesenjangan antar individu, antar sektor dan kesenjangan antar daerah.

Untuk mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat hal-hal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
- Memperbesar alokasi anggaran untuk kesejahteraan masyarakat, melalui jaminan dasar pendidikan, kesehatan dan pangan
- Penyaluran Dana Desa yang digunakan untuk memperbaiki fasilitas dasar di desa baik pembangunan pendidikan, pangan, kesehatan dan infastruktur.
- Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro Kecil.

## SASARAN 5 : MENURUNNYA ANGKA PENGANGGURAN

### Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan data BPS Provinsi Riau jumlah angkatan kerja pada Agustus 2017 sebanyak 2.950.510 orang, sedangkan Penduduk Yang Bekerja 2.765.496 orang. Pengangguran dapat diartikan orang yang masuk dalam angkatan kerja (usia 15 sampai 64 Tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkan pekerjaan, dengan demikian indikator ini bertujuan untuk mengetahui angka pengangguran yang ada di Provinsi Riau.

Dapat diketahui angka pengangguran di Provinsi Riau berdasarkan hasil perhitungan antara angkatan kerja dikurangi dengan penduduk yang bekerja adalah 184.564 orang. Realisasi dari indikator ini adalah 6,22% yang diperoleh dari perhitungan:

$$\begin{aligned} & \text{Angkatan kerja - Penduduk Yang Bekerja} \\ & = 2.950.510 - 2.765.496 = 184.564 \\ \text{Angka Pengangguran} & = \frac{184.564}{2.950.510} \times 100\% = 6,22\% \end{aligned}$$

Realisasi indikator kinerja Tingkat Pengangguran Tahun 2017 adalah 6,22 dengan capaian kinerja sebesar 100,63%.

Indikator Sasaran ini termasuk dalam kategori Sangat Baik karena berada dalam kelompok lebih dari 100%. Artinya realisasi target ini melebihi target yang ditentukan, dimana semakin kecil angka realisasi maka akan semakin tinggi kinerja.

**Grafik 3.8. Persentase Pengangguran Terbuka Provinsi Riau 2005-2017**



Sumber : Data Annual Provinsi Riau 2017

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Berbagai kebijakan pemerintah terkait penciptaan lapangan kerja tampaknya cukup berhasil menekan tingkat pengangguran, ditunjukkan oleh TPT yang bergerak turun dari 7,43 persen pada tahun 2016 menjadi 6,22 pada tahun 2017.

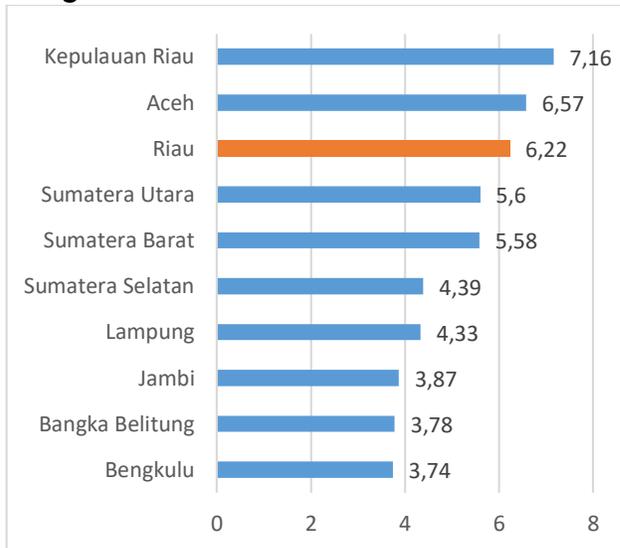
# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA



Jika dibandingkan dengan TPT Indonesia Agustus 2017 yaitu 5,50% (7,04 juta orang), TPT Provinsi Riau lebih tinggi 0,7%. Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Grafik berikut.

**Grafik 3.14. Tingkat pengangguran terbuka menurut Provinsi Sumatera Agustus 2017**



Upaya yang dilakukan untuk Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka, dapat dilakukan melalui Kegiatan Padat Karya. Padat Karya merupakan salah satu upaya untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran.

Secara umum, program padat karya bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan kesempatan usaha untuk meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan akan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan.

Pada dasarnya Penciptaan Kesempatan Kerja baru dapat juga dilakukan dengan memperbesar daya serap tenaga kerja di perusahaan-perusahaan.

Permasalahan/hambatan yang ditemui dalam pencapaian target kinerja menurunkan tingkat pengangguran adalah sebagai berikut :

- Permasalahan utama ketenagakerjaan yang masih dihadapi Provinsi Riau adalah tingginya tingkat pengangguran, yang antara lain disebabkan (1) tidak imbangnya pertumbuhan angkatan kerja dengan kesempatan kerja, (2) terbatasnya kesempatan kerja yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, (3) masih rendahnya kualitas angkatan kerja, (4) kesenjangan persediaan tenaga kerja dengan kebutuhan akan tenaga kerja yang sesuai dengan pasar kerja, dan (5) motivasi dan jiwa kewirausahaan angkatan kerja untuk menciptakan lapangan kerja baru masih rendah.
- Rendahnya kualitas tenaga kerja dan terbatasnya sarana-prasarana pelatihan di UPT PK/BLK
- Belum maksimal dan optimalnya fungsi Balai Latihan Kerja (BLK), perlunya penyempurnaan peraturan perundang-undangan ataupun norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) bidang ketenagakerjaan.

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA



- Belum selarasnya kebijakan ketenagakerjaan pusat dengan kebijakan/peraturan daerah, masih lemahnya lembaga hubungan industrial, terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) tertentu bidang ketenagakerjaan (Instruktur, Pengantar Kerja, Mediator, dan Pengawas Ketenagakerjaan).
- Masih tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan dan angka kecelakaan kerja, masih banyaknya anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, masih rendahnya kompetensi TKI yang bekerja di luar negeri serta masih rendahnya perlindungan bagi pekerja di luar negeri.

Cara / Kebijakan yang ditempuh adalah dengan menyediakan / melaksanakan Program Pembangunan Ketenagakerjaan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dengan sasarannya : Meningkatkan serta mengembangkan Kompetensi / Produktivitas Tenaga Kerja dengan bentuk Kegiatan antara lain :
  - a. Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berbasis Kompetensi

- b. Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berbasis Masyarakat :
  - c. Pelatihan Kewirausahaan
2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja dengan sasarannya adalah Pengurangan Pengangguran dengan bentuk kegiatan antara lain :
  - a. Pembentukan Kader Teknologi Padat Karya bertujuan untuk penciptaan perluasan kesempatan kerja, dengan bentuk kegiatan Padat Karya Produktif dan Infrastruktur.

Padat Karya Produktif sangat efektif dalam menyerap tenaga kerja dan Penganggur dalam jumlah yang relatif banyak. Padat Karya Produktif lebih diutamakan pada pemberdayaan usaha seperti budi daya ikan, ternak sapi, ikan dll.

Padat Karya Infrastruktur diarahkan pada pembuatan dan rehabilitasi fisik seperti pengerasan jalan, pembangunan jalan dll.

- b. Pembentukan Wira Usaha Baru yang dilakukan Perorangan atau kelompok Masyarakat

Pembentukan Wira Usaha Baru merupakan salah satu usaha yang

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA



dilakukan oleh perorangan atau kelompok masyarakat. Sektor usaha informal walaupun dalam skala kecil dibandingkan sektor usaha formal namun justru memiliki daya tahan yang luar biasa dalam menghadapi perekonomian

- c. Pengembangan Kelembagaan Produktifitas Dan Pelatihan Kewirausahaan
3. Program Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan dengan sasarannya adalah :Meningkatkan Pengawasan Ketenagakerjaan, Kesejahteraan Tenaga Kerja serta Penyelesaian Hubungan Industrial dengan bentuk kegiatan antara lain :
- a. Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  - b. Penetapan Upah Minimum dan Sosialisasi Upah Minimum
  - c. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Luar Pengadilan Hubungan Industrial.



## SASARAN 6 :

### TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE AND CLEAN GOVERNMENT

#### Indikator Opini BPK

# WTP

2014 2015 2016 2017

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI memberi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelasan dalam hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Keuangan Pemprov Riau dari Tahun 2014 hingga 2016. Opini ini adalah sama dengan raihan Pemprov Riau tiga tahun sebelumnya dan diharapkan pada tahun 2017 Opini BPK pada LHP dan LKPj Provinsi Riau adalah WTP. Penyerahan LHP dan LKPj oleh BPK akan dilaksanakan pada Juni 2018.

Capaian indikator kinerja ini disebabkan beberapa faktor pendukung yaitu :

1. Persentase kesesuaian PPAS terhadap RKPD
2. Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD
3. Persentase kesesuaian Renja SKPD terhadap Renstra SKPD
4. Jumlah kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung

6. terhadap penyusunan dokumen perencanaan
7. Jumlah Aparatur yang berkualitas dan memiliki kompetensi
8. Jumlah data sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah

Beberapa upaya pemerintah Provinsi Riau yang dilakukan untuk mempertahankan WTP diantaranya :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dengan merubah pola pendekatan *money follow function* menjadi *money follow programme priority*.
2. Bappeda melaksanakan program dan kegiatan penunjang yang akan menciptakan suatu kebijakan serta rekomendasi kebijakan di bidang perencanaan.
3. Bappeda Provinsi Riau selaku Pembina aparatur perencana telah melakukan upaya peningkatan kapasitas aparatur perencana dengan memfasilitasi, melaksanakan dan mengirim aparatur untuk mengikuti diklat dan bimtek di bidang perencanaan pembangunan.
4. Bappeda mengupayakan secara optimal agar tersedianya data yang lengkap

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA



sebagai dasar analisis perencanaan pembangunan yang dapat diakses dengan sistem online/elektronik.

### Indikator Skor LPPD

Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Provinsi Riau wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah setiap tahunnya.

Penyusunan LPPD Provinsi Riau telah dilaksanakan dengan melibatkan seluruh OPD dan penilaian LPPD Provinsi Riau Tahun 2017 akan dilaksanakan pada tahun 2018.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah kewajiban Kepala Daerah (KDH) yang dilaporkan kepada Pemerintah setiap tahun berdasarkan PP No. 3 Tahun 2007 dan dilakukan evaluasi sejak tahun 2009 sesuai

amanat PP No. 6 tahun 2008. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan secara terukur, dan melibatkan beberapa Kementerian/LPNK (Kemendagri, Kemen PAN-RB, BPS, dan LAN) terhadap Provinsi, Kabupaten, dan Kota untuk memotret kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terutama dari aspek Manajemen Pemerintahan. Dari hasil evaluasi tersebut dapat diperoleh gambaran kinerja dari pemerintahan daerah, baik di level pengambilan kebijakan maupun di level pelaksanaan kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat.

Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target :

1. Melakukan evaluasi mandiri terlebih dahulu sebelum dilakukan evaluasi oleh Tim Nasional (Kemendagri)
  2. Melakukan sosialisasi-sosialisasi mengenai LPPD Provinsi Riau kepada OPD di lingkungan Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau.
  3. Membuat sistem e-LPPD guna mempercepat pengumpulan data
- Kendala / hambatan dalam pencapaian target kinerja :

1. Sulitnya pengumpulan data LPPD dari OPD Provinsi Riau maupun Kabupaten/Kota se Provinsi Riau
2. Masih terbatasnya dana dalam penyusunan LPPD Provinsi Riau

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

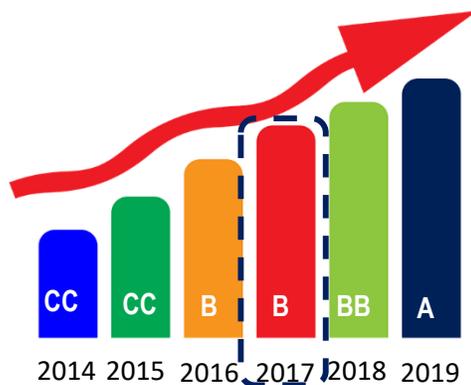


Solusi strategi pemecahan masalah yang akan dilakukan di tahun depan untuk mengatasi kendala/permasalahan :

1. Melakukan pembinaan terhadap OPD Provinsi Riau maupun Kabupaten/Kota dalam penyusunan LPPD
2. Dialokasikan penambahan dana untuk penyusunan LPPD Provinsi Riau

Penggunaan sumber daya keuangan 2017 adalah Rp 414.390.468.004,- dengan Realisasi Fisik 91,64% dari total anggaran Rp. 452.177.110.127,- melalui kegiatan Penyusunan LPPD Provinsi Riau, Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau, Penyusunan LKPJ Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pengembangan kapasitas pemerintahan daerah, E-tata Kelola Pemerintahan.

### Indikator Nilai Akuntabilitas



Ket : 2018 -2019 (target)

Penilaian terhadap akuntabilitas Pemerintah Provinsi Riau terkait dengan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan

capaian kinerja. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Provinsi Riau sudah menunjukkan hasil yang cukup memadai namun masih memerlukan banyak perbaikan.

Hasil penilaian akuntabilitas kinerja Provinsi Riau Tahun 2017 menunjukkan nilai 66,50 dengan predikat B. Hasil ini menunjukkan peningkatan yang cukup baik dari tahun sebelumnya yaitu 60,62 dengan predikat yang sama. Akan tetapi pencapaian ini masih belum mencapai target yang diharapkan pada RPJMD yaitu BB.

Akan tetapi upaya Peningkatan Predikat AKIP Provinsi Riau telah dilaksanakan melalui Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, seperti :

1. Revisi Dokumen RPJMD Provinsi Riau yang mengacu pada .....
2. Reviu Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Riau;
3. Revisi Rencana Strategis OPD yang mengacu pada Revisi RPJMD
4. Asistensi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA



5. Pelaksanaan Pembinaan Penerapan Manajemen Kinerja Provinsi Riau;
6. Pelaksanaan kegiatan Pengukuran Kinerja OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;

Hasil evaluasi menunjukkan hal sebagai berikut.

1. Sebagian besar OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau belum mampu merumuskan kinerja (tujuan, Indikator tujuan, sasaran strategis dan indikator sasaran strategis) yang berorientasi terhadap hasil;
2. ketidakmampuan menerapkan kinerja yang ingin dicapai mengakibatkan adanya risiko ketidakselarasan antara kegiatan dan program yang dilaksanakan;
3. Indikator Kinerja Utama yang telah disusun masih sebatas pemenuhan dokumen, belum dijadikan alat ukur kinerja baik untuk tingkat Kabupaten/Kota maupun OPD.
4. kualitas pengukuran atas pencapaian target-target indikator kinerja yang telah ditetapkan di Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja belum optimal.
5. seluruh OPD telah menyusun Laporan Kinerja, namun belum seluruhnya membahas kinerja secara mendalam dan masih sebatas pelaksanaan program, kegiatan dan serapan anggaran di OPD.

6. Inspektorat Provinsi Riau telah melakukan implementasi SAKIP terhadap OPD akan tetapi evaluasi yang dilakukan belum sepenuhnya menggambarkan kondisi penerapan SAKIP.

Adapun rekomendasi dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP dan meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Provinsi Riau adalah sebagai berikut.

1. Menajamkan peran dan fungsi Bappeda dalam penyempurnaan Renstra dan Perjanjian Kinerja OPD;
2. Melakukan penataan ulang program dan kegiatan dengan mempertimbangkan keselarasan dengan kinerja yang ingin dicapai;
3. Memastikan bahwa Indikator Kinerja Utama yang telah disusun dijadikan alat ukur kinerja;
4. Meningkatkan pemanfaatan aplikasi sebagai sarana monitoring dan evaluasi oleh pimpinan;
5. Meningkatkan evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Riau;
6. Meningkatkan pemahaman dan keterlibatan pimpinan OPD terhadap penerapan manajemen kinerja organisasi;
7. Memanfaatkan informasi kinerja dan capaian kinerja dari organisasi sebagai

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA



ukuran pemberian *Reward* dan *Punishment*.

Penggunaan sumber daya keuangan dalam rangka pencapaian indikator nilai akuntabilitas adalah Rp 364.325.276.486 dengan Realisasi Fisik 38,26% dari total anggaran Rp 952.244.052.065,- melalui pelaksanaan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

### Indikator Nilai Keterbukaan Informasi



Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2017 dilakukan guna mengetahui pelaksanaan keterbukaan informasi di Badan Publik sebagaimana amanah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) yang kemudian secara teknis telah diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi

Badan Publik. Kegiatan ini dilaksanakan selama 7 (tujuh) bulan yang berlangsung pada Juni-Desember 2017 yang diakhiri dengan Pemeringkatan Badan Publik. Badan Publik WAJIB mengikuti seluruh alur kegiatan yang telah ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat.

Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2017 dalam penilaiannya menggunakan 4 indikator, yaitu: 1. Mengumumkan Informasi Publik 2. Menyediakan Informasi Publik 3. Pelayanan Permohonan Informasi Publik 4. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

Provinsi Riau tahun ini tidak masuk dalam pemeringkatan Keterbukaan Informasi pada Tahun 2017, hal ini terjadi dikarenakan hal-hal sebagai berikut.

1. Penilaian tergantung pada Komisi Informasi Pusat, sehingga sulit untuk mengukur kinerja per bulan, triwulan, semesteran karena nilai baru diperoleh pada akhir tahun anggaran.
2. Kurang koordinasi antara bidang yang menangani keterbukaan informasi dengan Tim Penilai di Komisi Informasi Pusat sehingga Provinsi Riau selalu mengalami keterlambatan dalam pengiriman bahan.
3. Bidang yang menangani keterbukaan informasi belum maksimal dalam meningkatkan nilai keterbukaan informasi Provinsi Riau.

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA



Upaya perbaikan Pencapaian Nilai keterbukaan informasi tidak terlepas dari pelaksanaan 3 program yaitu Program Kerjasama Informasi dan Media Massa, Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik, dan Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

### Indikator Nilai Reformasi Birokrasi



**R**eformasi Birokrasi merupakan bentuk perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia membutuhkan penyamaan persepsi dan indikasi awal permasalahan reformasi birokrasi di setiap jenjang aktor pelayanan publik. Reformasi Birokrasi juga dinilai sebagai pendorong keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka mewujudkan Good Governance dan Good Local Governance.

Dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019, sementara itu berdasarkan Peraturan

Menteri PAN dan RB Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Evaluasi difokuskan pada upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2016 menunjukkan peningkatan dari tahun 2015 dengan Indeks RB sebesar 37,66 meningkat menjadi 52,88 atau kategori CC pada tahun 2017. Hasil ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, pencapaian tersebut tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi, diantaranya :

1. Melakukan pengorganisasian pelaksanaan reformasi birokrasi dengan membentuk dan menetapkan tim reformasi birokrasi;
2. Penataan manajemen SDM, antara lain dengan menerapkan proses penerimaan pegawai yang transparan, objektif, dan akuntabel, menetapkan standar kompetensi jabatan dan promosi jabatan secara terbuka untuk Pejabat Tinggi Pratama;
3. Dalam hal peningkatan akuntabilitas kinerja sebagian pimpinan telah terlibat dalam penyusunan Renstra dan Perjanjian Kinerja;

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA



4. Dalam rangka penguatan pengawasan, Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan aturan terkait penanganan gratifikasi, SPIP dan pengaduan masyarakat.

Dalam rangka peningkatan kualitas birokrasi serta menumbuhkan budaya kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau terdapat beberapa hal yang masih perlu disempurnakan yaitu :

1. Meningkatkan keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
2. Membentuk agent of change dan role model dalam pengimplementasian reformasi birokrasi;
3. Setiap organisasi perlu membuat peta bisnis proses yang dijabatkan dalam bentuk SOP.
4. Perlu melakukan asesment kepada seluruh ASN;
5. Menindaklanjuti pencaanangan pembangunan zona integritas dengan melakukan pembangunan unit kerja percontohan menuju wilayah bebas korupsi/wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBK/WBBM).

Ketercapaian tersebut tidak terlepas dari Peran Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Riau dan Inspektorat Provinsi Riau melalui pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi dengan Kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Kegiatan Pengembagian Budaya

Kerja dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Pembinaan Reformasi Birokrasi di Provinsi Riau dan Penyusunan Quick Wins Revolusi Mental.

Adapun penggunaan sumber daya keuangan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Rp 307.477.473.232 atau sebesar 86,03% dari total anggaran Rp 357.420.443.547. Dengan demikian terdapat efisien sebesar % dari total anggaran pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi.

### SASARAN 7 : LESTARINYA KEANEKARAGAMAN BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL

**Indikator Jumlah Karya Cipta Seni Budaya yang dihasilkan (HAKI Karya Seni)**

Realisasi indikator kinerja Jumlah Karya Cipta Seni Budaya Melayu yang Dihasilkan (HAKI Karya Seni) Tahun 2017 adalah 0%. Hal ini terjadi dikarenakan Pada APBD Murni Tahun 2017 tidak ada kegiatan/Rincian output kegiatan ataupun rincian Rekening untuk melaksanakan Pendaftaran HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) terhadap Karya Cipta Seni Budaya Melayu, suatu Karya Seni Budaya dapat ditetapkan membutuhkan waktu 4 s/d 18 bulan untuk bisa menjadi HAKI.

Pada APBD-P 2017 Dinas Kebudayaan Provinsi Riau mencoba mengusulkan Rincian Rekening Pendaftaran HAKI , mengingat waktu APBD-P 2017 yang singkat mengingatkan Pendaftaran Karya Cipta Seni Budaya Melayu tidak dapat dilaksanakan.

Dinas Kebudayaan Provinsi Riau telah menginventarisir 46 Karya Seni Budaya yang akan didaftarkan HAKInya pada tahun 2018 melalui kegiatan Bidang Rekayasa Budaya tahun 2017 dalam bentuk Dvd dan buku diantaranya :

a.

- a. PENDOKUMENTASIAN PENYUSUNAN DAN PENOTASIAN LAGU -LAGU KLASIK MELAYU DAERAH RIAU TAHUN 2017
  1. Kabupaten Siak (Sri Serawak) 1 DVD
  2. Kabupaten Bengkalis (Nasib Nelayan) 1 DVD
  3. Kabupaten Rokan Hulu (Bodindong) 1 DVD
  4. Kabupaten Rokan Hilir (Senbai) 1 DVD
  5. Kabupaten Indragiri Hulu (Perahu Jongkong) 1 DVD
  6. Kabupaten Indragiri Hilir (Sisip) 1 DVD
  7. Kabupaten Kampar (Batang Taunjam) 1 DVD
  8. Kabupaten Pelalawan (Nandung) 1 DVD
  9. Kabupaten Kepulauan Meranti (Samba Raja Doli) 1 DVD
  10. Kota Dumai (Hit lahit) 1 DVD
  11. Kabupaten Kuantan Singingi (Dang Dudang Ehe) 1 DVD
- b. PENDOKUMENTASIAN DAN PUBLIKASI SASTRA TRADISI LISAN SE PROVINSI RIAU TAHUN 2017
  1. Kabupaten Siak (Muatok) 1 DVD
  2. Kabupaten Bengkalis (Yong Dollah) 1 DVD

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA



3. Kabupaten Rokan Hulu (Koba Sicuriang) 1 DVD
  4. Kabupaten Rokan Hilir (Antau Kopa) 1 DVD
  5. Kabupaten Indragiri Hulu (Zikir Burdah) 1 DVD
  6. Kabupaten Indragiri Hilir (Madihin) 1 DVD
  7. Kabupaten Kampar (Pantun Atui) 1 DVD
  8. Kabupaten Pelalawan (Togak Tunggul) 1 DVD
  9. Kabupaten Kepulauan Meranti (Ayah Ande) 1 DVD
  10. Kabupaten Kuantan Singingi (Nandong) 1 DVD
- c. **DOKUMENTASI GRAFIS DAN VIDEO SENI TARI KLASIK DAN SILAT KLASIK MELAYU**
1. Kabupaten Rokan Hulu (Tari Cegak) 1 DVD
  2. Kabupaten Indragiri Hulu (Silat Talang Mamak) 1 DVD
  3. Kabupaten Kabupaten Kuantan Singingi (Silat Pangean) 1 DVD
- d. **DIGITALISASI NASKAH KUNO**
- 20 Naskah Kuno yang akan di HAKI 20 DVD
- e. **DALAM BENTUK BUKU**
1. Buku Kumpulan Pendokumentasian dan Penotasian Lagu - Lagu Klasik Melayu Daerah TAhun 2017
  2. Buku Kumpulan Sastra Tradisi Lisan Se Provinsi Riau Tahun 2017

Akan tetapi, penggunaan sumber daya keuangan Anggaran Kegiatan Bidang Rekayasa Budaya adalah Rp 0,- dikarenakan kegiatan dimaksud belum dapat dilaksanakan.

**Indikator Jumlah Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal berbasis Budaya Melayu sesuai Standar**

Penerapan Kurikulum Muatan Lokal berbasis Budaya Melayu sesuai Standar (Sekolah) bisa dengan menerapkan dalam pelajaran muatan lokal, misalnya arab melayu. Arab melayu yaitu huruf arab namun menggunakan bahasa melayu. Masyarakat di Riau ini tidak lepas dari tulisan arab melayu. Lalu juga siwa dapat mengambil nilai-nilai moral, nilai ketuhanan, serta nilai karakter dalam budaya melayu.

Selain muatan lokal arab melayu, sekolah juga dapat membentuk pendidikan budaya melayu dengan diterapkannya muatan lokal pelajaran seni. Dalam muatan lokal ini, siswa dapat mengetahui dan mempelajari segala macam seni yang ada di Tanah Melayu Riau ini. Siswa dapat mempelajari tarian-tarian dari Riau, atau menggambar ukiran-ukiran khas melayu Riau. Siswa dapat menyanyikan atau mengaransemen lagu daerah Riau. Bahkan siswa dapat mementaskan pertunjukkan theater yang bertemakan cerita rakyat dari

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA



Riau. Hal ini dapat menambah kreativitas dan wawasan para siswa. Selain itu hal ini juga bertujuan agar para siswa dapat mencintai dan memelihara adat dan budaya mereka sendiri.

Untuk peningkatan sasaran ini setiap sekolah-sekolah di Provinsi Riau ini wajib memasukan pendidikan berbudaya melayu dalam kurikulum di sekolah. Hal ini dibuat agar para generasi penerus bangsa dapat lebih mudah dalam mempelajari dan mengkaji nilai-nilai yang ada pada pola adat dan budaya melayu di Riau. Apalagi di era globalisasi ini kebudayaan kita hampir digeser oleh kebudayaan barat. Banyak kebudayaan barat yang negatif masuk kedalam kehidupan kita. Selain itu tidak semua orang bisa pintar-pintar memilih budaya luar yang masuk. Dengan pendidikan berbudaya melayu inilah pergeseran budaya itu dapat dihindari.

Data jumlah sekolah yang merupakan Data Indikator Kinerja bersifat komposit (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau). Adapun jumlah sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal berbasis budaya melayu yaitu sejumlah 84 sekolah (tahun 2017) atau 168% dari target 50 sekolah.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Riau telah

mencapai 20%, mengingat tipe perhitungan Jumlah Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal berbasis Budaya Melayu sesuai Standar (Sekolah) bersifat non-kumulatif dengan kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD adalah 300 Sekolah.



### SASARAN 8 : MENINGKATNYA KERUKUNAN HIDUP BERAGAMA

#### Indikator Persentase penyelesaian konflik antar umat beragama

Fenomena konflik sosial mempunyai aneka penyebab. Tetapi dalam masyarakat pluralitas penyebab terdekatnya adalah masalah mayoritas dan minoritas golongan agama.

Konflik antar umat beragama kerap kali terjadi. Faktor perbedaan, kurangnya toleransi, dan kurangnya saling menghargai satu sama lain menjadi pemicu utama konflik.

Upaya mencegah agar potensi konflik tidak menjadi kasus telah dilakukan oleh Pemerintah dan pihak terkait yaitu melalui pendekatan struktural secara Top-down melalui jalan musyawarah, melakukan deteksi dini, ataupun proses penyelesaian kasus dalam jalur hukum.

Berdasarkan data dari Badan Kesbangpol Provinsi Riau ada sebanyak 4 potensi konflik yang ditemui di Kabupaten/Kota selama kurun waktu 2017, dan potensi konflik tersebut telah dilakukan proses penyelesaian dengan dibantu oleh pihak Kepolisian dan FKUB Provinsi Riau.

Tabel 3.1. Data Potensi Konflik Agama di Provisni Riau tahun 2017

No	Uraian	Tempat	Kab/Kota
1	Penolakan beribadah	Desa Sei. Paku Kec. Kampar Kiri	Kabupaten Kampar
2	Permintaan pembongkaran Gereja GPMI	Jl. Riau Ujung	Kota Pekanbaru
3	Penolakan pembangunan Gereja Betani Indonesia oleh masyarakat	Kelurahan Delima/Tabek Gadang	Kota Pekanbaru
4	Perluasan Vihara yang berdekatan dengan pasar	Parit X, Tembilahan	Kabupaten Indragiri Hilir

Sumber : FKUB Provinsi Riau

Ketercapaian indikator persentase penyelesaian konflik umat beragama ini tidak terlepas dari pelaksanaan Program Fasilitasi Kewaspadaan Nasional dan Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan melalui kegiatan :

1. Penguatan Kelembagaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Se-Provinsi Riau
2. Pemetaan potensi konflik dan penanganan konflik sosial Provinsi Riau
3. Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provnsi Riau
4. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

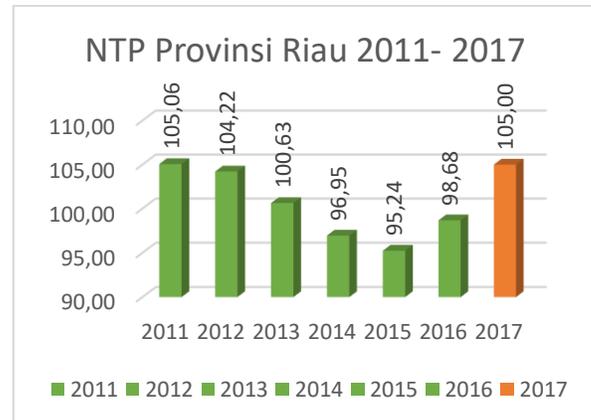
### SASARAN 9 : MENINGKATNYA PEMBANGUNAN SEKTOR PERTANIAN (TANAMAN PANGAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN)

#### Indikator Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB

Salah satu indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah dengan cara melihat progress pertumbuhan maupun peningkatan nilai PDRB baik berdasarkan harga konstan maupun harga berlaku dari tahun ke tahun.

Berdasarkan Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Triwulan II dan III Tahun 2016-2017, sektor pertanian, perikanan dan kehutanan menyumbang 23,96 pada tahun 2017, artinya meningkat dari tahun 2016 yaitu 23,33%. Akan tetapi capaian kontribusi tersebut belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 24,65.

#### Indikator Nilai Tukar Petani



Indikator kinerja selanjutnya adalah Nilai tukar petani (NTP). Capaian indikator kinerja Nilai tukar petani (NTP) Tahun 2017 adalah 98,68, dengan capaian kinerja sebesar 92,52%.

Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) digunakan untuk mengetahui nilai tukar petani di Provinsi Riau. Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib) dan dinyatakan dalam persentase. Tujuan mengetahui indikator NTP untuk melihat tingkat kesejahteraan petani, dengan mengukur kemampuan tukar produk yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan

# BAB III

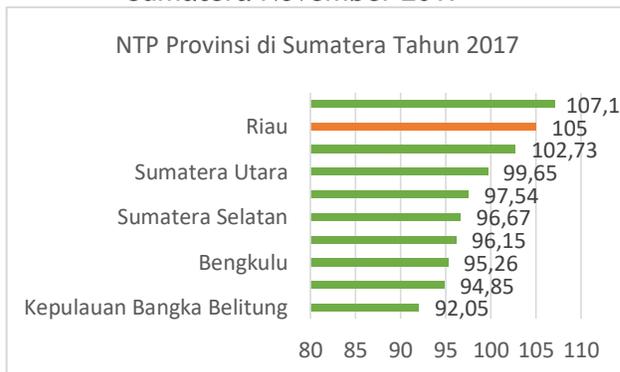
## AKUNTABILITAS KINERJA



dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi maupun untuk konsumsi rumah tangga petani. Semakin tinggi NTP dapat diartikan kemampuan daya beli atau daya tukar (term of trade) petani relatif lebih baik dan tingkat kehidupan petani juga lebih baik.

Jika dibandingkan dengan 10 Provinsi di Sumatera, NTP Provinsi Riau menduduki peringkat ke-2 di bawah Provinsi Lampung.

Nilai Tukar Petani 10 Provinsi di Pulau Sumatera November 2017



Pencapaian tersebut tidak terlepas dari kontribusi Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan dalam melaksanakan Upaya yang dilakukan untuk mencapai sasaran melalui kegiatan ditahun 2017 yaitu kegiatan penumbuhan dan pengembangan kawasan produksi padi, penumbuhan dan pengembangan kawasan jagung, pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura, peningkatan kapasitas brigade proteksi tanaman, cadangan pestisida dan pembinaan kelembagaan perlindungan TPH, pembinaan dan pengembangan kawasan

produksi aneka kacang dan umbi-umbian dengan total anggaran sebesar Rp.10.968.473.775 terealisasi Rp. 10.177.436.306 atau 92,79 %

Akan tetapi masih terdapat Hambatan / kendala dalam mencapai sasaran untuk produksi tanaman pangan utama yaitu :

- Banjir
- Keterlambatan penyaluran benih ke petani
- Pergeseran jadwal tanam
- Faktor perubahan iklim global sangat berdampak pada sektor pertanian yaitu perubahan pola hujan, meningkatnya kejadian iklim ekstrim (banjir, kekeringa, angin kencang dan petir) dan peningkatan suhu udara
- Ketersediaan infrastruktur pertanian sangat terbatas khususnya jaringan irigasi. Keterbatasan penyediaan jaringan irigasi mengakibatkan keterbatasan pasokan air sebagai salah satu komponen penting dalam proses penanaman yang secara langsung akan dapat memicu terjadinya alih fungsi lahan pangan menjadi lahan untuk kebutuhan non pangan

Dari subsektor perkebunan  
Pencapaian kinerja produktivitas

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA



komoditas utama perkebunan ( kelapa sawit, kelapa dan karet) dilakukan dengan formulasi perhitungan perbandingan jumlah produksi komoditas perkebunan dalam satu tahun (kg) dengan luas lahan produksi (ha) pada tahun berkenaan, berdasarkan Renstra kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan tahun 2017 - 2019 target produktivitas komoditas kelapa sawit, sebesar 3.762 kg/ha/th terealisasi sebesar 3.710 kg/ha/th, tanaman kelapa target sebesar 1.130 kg/ha/th terealisasi sebesar 1.165 kg/ha/th dan tanaman karet target sebesar 1.187 kg/ha/th terealisasi sebesar 1.100 kg/ha/th.

Sementara dari subsektor perikanan dan kelautan dalam rangka meningkatkan produksi perikanan dan kelautan dilakukan upaya diantaranya :

1. Peningkatan penyediaan pakan murah dan terjangkau serta berkualitas.
2. Pemenuhan kebutuhan induk dan benih bermutu secara mandiri;
3. Pengembangan kawasan perikanan budidaya (minapolitan) dengan mengintegrasikan rantai produksi dari hulu sampai hilir untuk efisiensi produksi;
4. Peningkatan daya saing produk perikanan melalui sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).

5. Melakukan identifikasi pencadangan Kawasan Konservasi Perairah Daerah (KKPD)

Dari sub sektor peternakan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berkontribusi terhadap Nilai Tukar Petani melalui upaya peningkatan nilai tambah produk peternakan terutama pengolahan kotoran ternak untuk pembuatan bio fertilizer. Dan membuat rencana aksi untuk membangun sistem pemanfaatan ternak secara terintegrasi dengan perkebunan kelapa sawit dengan membentuk kawasan-kawasan percontohan.

Gambar 3.6. Gubri serahkan Bibit Jagung kepada petani saat Penanaman Perdana Bibit Padi dan Jagung seluas 5000 Ha di kec Bunga Raya Kab Siak





### SASARAN 10 : MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

#### Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran Terwujudnya lingkungan hidup berkualitas diukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Indikator yang menjadi dasar penilaian IKLH di Indonesia saat ini mencakup aspek udara, air sungai dan tutupan hutan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup versi baru (IKLH baru) merupakan istilah baru yang menggabungkan keseluruhan jenis indeks kualitas lingkungan dari semua matra yang mencakup udara, air, hutan, flora, dan fauna, kesehatan masyarakat, dan kesehatan lingkungan.

IKLH versi baru ini dikembangkan dengan cara menggabungkan semua komponen indeks yang mencakup Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Tutupan Hutan (ITH), Indeks Keanekaragaman Hayati (IKH), Indeks Kesehatan Masyarakat (IKM), dan Indeks Kesehatan Lingkungan (IKL). Saat ini, Provinsi Riau menghitung IKLH meliputi ISPU, IKA dan IHT. Fungsi mengukur indikator ini adalah untuk mengetahui kualitas lingkungan hidup Provinsi Riau.

Tabel 3.3. Perubahan IKLH Provinsi Riau dalam periode 2011-2014

INDEKS	Tahun						Pertumbuhan/Tahun (%)
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Udara	67,06	51,91	52,89	60,30	*)	72,4	(2,23)
Air	55,60	54,30	48,71	7,53	47,65	46,73	(5,02)
Tutupan Hutan	60,49	50,65	50,60	50,60	50,60	**)	(5,46)
IKLH	61,00	52,12	50,72	52,59	34,53	**)	(4,52)

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

\*) data tidak tersedia

\*\*\*) data belum tersedia

Nilai IKLH Provinsi Riau cenderung mengalami penurunan dengan berbagai penyebab, antara lain :

- Peningkatan laju alih fungsi lahan yang berakibat berkurangnya tutupan lahan
- hingga tahun 2015, peristiwa kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di Riau, sehingga mempengaruhi nilai IKU selain pengendalian pencemaran udara sumber bergerak (transportasi perkotaan) yang belum optimal.
- pengelolaan limbah domestik merupakan sumber pencemar utama air permukaan selain industri dan perkebunan/pertanian. Sampai saat ini pengelolaan limbah domestik tersebut belum berdampak terhadap perbaikan nilai IKA

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA



d. selain itu, khusus untuk IKA, data yang digunakan untuk perhitungan IKA hanya berasal dari 4 sungai besar di Riau (Kampar, Siak, Rokan dan Indragiri) yang kualitasnya sudah tercemar. Sedangkan sumber air permukaan di Riau tidak hanya keempat sungai besar tersebut, tetapi banyak anak sungai dan danau dengan kualitas air yang lebih baik untuk dijadikan sumber data yang dapat meningkatkan IKA.

Target Kualitas Lingkungan Hidup masih belum tercapai, kondisi ini disebabkan oleh :

- a. peningkatan laju alih fungsi lahan yang berakibat berkurangnya tutupan lahan.
- b. pengelolaan limbah domestik merupakan sumber pencemar utama air permukaan selain industri dan perkebunan/pertanian
- c. selain itu, khusus untuk IKA, data yang digunakan untuk perhitungan IKA hanya berasal dari 4 sungai besar di Riau (Kampar, Siak, Rokan dan Indragiri) yang kenyataannya memang kualitasnya sudah tercemar. Sedangkan sumber air permukaan di Riau tidak hanya keempat sungai besar tersebut, tetapi banyak anak sungai dan danau dengan kualitas air yang lebih baik untuk dijadikan sumber data yang dapat meningkatkan IKA.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Riau sebagai upaya perbaikan diantaranya adalah :

1. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
2. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam
3. Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
4. pengendalian kebakaran hutan
5. pemanfaatan potensi sumber daya hutan
6. rehabilitasi hutan dan lahan
7. perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
8. pembinaan dan penerbitan industri hasil hutan
9. perencanaan dan pengembangan hutan
10. penguatan usaha ekonomi masyarakat sekitar hutan

Upaya tersebut dilakukan dengan pemanfaatan sumber daya keuangan sebesar Rp 23.307.050.418,00,- atau sebesar 77,01%.

Gambar 3.7. Gubri H Arsyadjuliandi Rachman memberikan sambutan pada Hari Menanam Pohon Indonesia Tahun 2017, di Desa Pantai, Kec. Kuantan Mudik - Kab. Kuansing





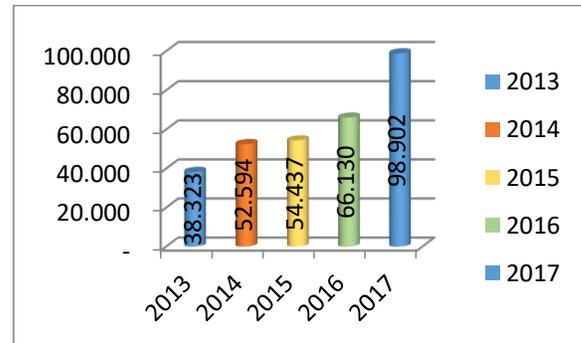
### SASARAN 11 : MENINGKATKAN JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN ASING

#### Indikator jumlah kunjungan wisatawan asing

Indikator jumlah kunjungan wisatawan asing adalah jumlah wisatawan yang berasal dari luar negeri yang mengunjungi Provinsi Riau. Tujuan mengukur indikator ini adalah mengetahui kondisi pariwisata di Provinsi Riau. Dampak Pariwisata Terhadap Perekonomian Industri pariwisata menghasilkan manfaat ekonomi yang besar baik bagi Daerah tuan rumah, maupun Negara asal para turis. Salah satu motivasi utama sebuah daerah mempromosikan dirinya sebagai daerah dengan tujuan wisata adalah timbul kemajuan dalam ekonomi, terutama bagi Negara-negara berkembang.

Secara umum capaian Sasaran meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan asing sudah dicapai sesuai target. Indikator kinerja Jumlah kunjungan wisatawan asing Tahun 2017 adalah 98.902 orang dengan capaian kinerja sebesar 140,27%. Indikator Sasaran ini termasuk dalam kategori Sangat Baik karena berada dalam kelompok rentang nilai > 100%.

Grafik 3.14. Perbandingan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tahun 2013-2017



Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran strategis ini sebesar Rp 48.377.211.513,- atau 89.37%. Artinya terdapat efisiensi sumber daya keuangan sebesar Rp 10.63%. Peningkatan capaian indikator kinerja ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau melalui pelaksanaan berbagai upaya Pengembangan kerangka strategi Pemasaran Pariwisata dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Melihat DOT (Destination, Origin, Time)
2. Melalui BAS (Branding - Advertising - Selling)
3. Exploring Tour Pariwisata Riau.
4. Dukungan Event-event Pariwisata Daerah.

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA



5. Pemilihan Bujang Dan Dara Provinsi Riau.
6. Peningkatan Website Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif .
7. Promosi Pariwisata Riau melalui berbagai jalur media (POS = Paid Media, Owned Media, Social Media)
8. Tourism Information Center (TIC)
9. Ikut berpartisipasi dalam event Nasional dan Internasional

Jika dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan asing maupun wisatawan nusantara yang melebihi target, akan tetapi lama tinggal wisatawan mengalami penurunan dari target 4,20 (4 hari) menjadi 3,54 (3 hari). terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi lama tinggal wisatawan tersebut diantaranya.

1. Sarana dan prasarana destinasi wisata yang belum memadai
2. faktor yang mempengaruhi belum tercapainya target kinerja dalah atraksi wisata yang masih kurang dan faktor pelayanan yang masih kurang baik.

Adapun upaya pemecahan masalah urusan pariwisata dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut.

1. Melakukan pengembangan destinasi wisata yang baru yang dinilai berpotensi mendatangkan banyak wisatawan
2. Lebih berperan aktif dalam membuat terobosan baru, khususnya meningkatkan lama tinggal wisatawan,

seperti menyelenggarakan atraksi wisata dan paket wisata yang dijual dan memasukkan wisata-wisata baru.

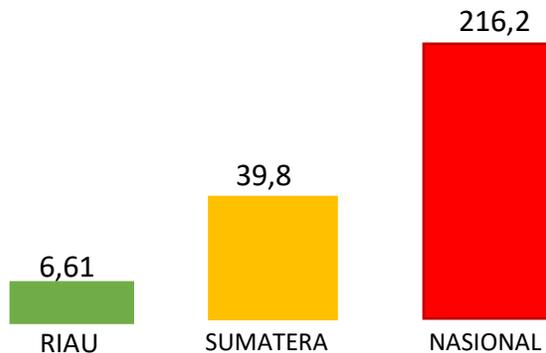
3. Segera ditindaklanjuti dengan pelatihan SDM Pariwisata untuk meningkatkan kemampuan dalam memberikan pelayanan publik (kehumasan)
4. Diperlukan adanya kepastian hukum, jaminan keamanan, penyederhanaan perizinan dan insentif-insentif lain bagi investor kepariwisataan
5. Peningkatan kualitas produk pariwisata baik dalam bentuk pelayanan, daya tarik maupun paket-paket wisata sehingga memiliki daya saing yang kuat
6. Menanamkan jiwa bisnis kepariwisataan terhadap seluruh elemen masyarakat
7. Menyamakan persepsi dari seluruh elemen masyarakat untuk bergerak bersama-sama dalam setiap kegiatan dikaitkan dengan kegiatan kepariwisataan
8. Mensinergikan berbagai event kegiatan, baik antar Provinsi Riau berupa dukungan dana dalam rangka pengembangan pariwisata di Riau.

Gambar 3.8. Menteri Pariwisata bersama Gubernur Riau meluncurkan event pesona wisata Riau Maret 2017



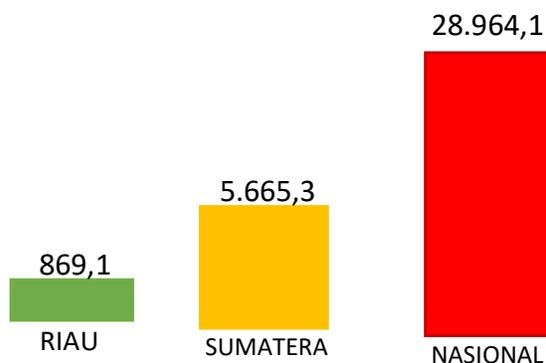
## SASARAN 13 : MENINGKATNYA INVESTASI

### SASARAN MENINGKATNYA INVESTASI



INVESTASI PMDN 2016  
(DALAM TRILIUN RUPIAH)  
Sumber : BKPM

INVESTASI PMDN PROVINSI RIAU  
TAHUN 2017 MENCAPAI 6.744,9 TRILIUN



INVESTASI PMA 2016  
(Dalam Juta US \$)  
Sumber : BKPM

INVESTASI PMA PROVINSI RIAU  
TAHUN 2017 MENCAPAI 6.744,9 TRILIUN

### Indikator Nilai investasi (PMDN)

Indikator Nilai investasi (PMDN) Tahun 2017 adalah Rp 6.744,9 triliun dengan capaian kinerja sebesar 61,57%. Indikator sasaran ini belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan yaitu Rp 10.955,61 triliun.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Riau telah tercapai 58,53%, mengingat tipe perhitungan indikator Nilai investasi (PMDN) bersifat nonkumulatif dengan kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD adalah 6.232,55 triliun.

Ketidak tercapaian target indikator tersebut disebabkan beberapa kendala yang ditemui dalam pelaksanaannya yaitu :

- adanya rasionalisasi anggaran 2017 sehingga kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja badan penanaman modal daerah
- Keterbatasan dana dalam mempromosikan daerah ke luar negeri untuk mengikuti event / acara yang diadakan di berbagai negara

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA



c. keterbatasan dana dalam mempromosikan daerah ke luar negeri untuk mengikuti event / acara yang diadakan di berbagai daerah di indonesia.

### Indikator Nilai investasi (PMA)

Namun, jika dilihat dari Nilai investasi (PMA) Provinsi Riau tahun 2017 mencapai 1.152,02 US \$ atau 113,44% dari taeget yang ditetapkan yaitu 1.152,02 US \$.

Keberhasilan tersebut dapat dicapai melalui upaya yang dilakukan :

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi program kerja sehingga tersedianya laporan monitoring dan evaluasi kinerja Badan Penanaman Modal Daerah
- b. melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada investor tentang pelaksanaan penanaman modal
- c. melakukan promosi daerah baik didalam negeri maupun di luar negeri melalui expo - expo yang diadakan didaerah maupun luar daerah
- d. melakukan promosi daerah baik didalam negeri maupun di luar negeri melalui expo - expo yang diadakan didaerah maupun luar daerah
- e. Menyediakan fasilitas kebutuhan calon investor pada masa pra investasi sehingga meningkatnya minat investor untuk berinvestasi di Provinsi Riau

- f. melakukan promosi daerah baik didalam negeri maupun di luar negeri melalui expo - expo yang diadakan didaerah maupun luar daerah
- g. Melakukan koordinasi program kerja promosi dan penanaman modal se- Provinsi Riau
- h. melakukan konsolidasi dengan BKPM pusat mengenai perencanaan investasi
- i. menyusun database potensi dan peluang investasi kab/kota se Provinsi Riau
- j. Membuat buku statistik mengenai kenaikan data investasi setiap tahunnya
- k. Melaksanakan warta promosi daerah untuk meningkatkan penyebaran dan kualitas informasi serta apresiasi dan minat kalangan dunia usaha
- l. Melakukan evaluasi mutu pelayanan perizinan dan nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Adapun solusi yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian nilai Investasi Provinsi Riau pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Agar dalam pembahasan dalam forum skpd atau dalam hearing dewan kegiatan ini lebih diperhatikan dengan tidak mengurangi dana pada kegiatan ini, agar lebih maksimalnya dalam melakukan kegiatan ini sehingga indikator keluaran nya dapat tercapai.

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA



b. Agar dalam pembahasan dalam forum skpd atau dalam hearing dewan kegiatan ini lebih diperhatikan dengan tidak mengurangi dana pada kegiatan ini, agar lebih maksimalnya dalam melakukan kegiatan ini sehingga indikator keluaran nya dapat tercapai.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran strategis ini sebesar Rp 12.117.352.545,- atau 77,12% dari total anggaran Rp 15.712.259.477,-. Artinya terdapat efisiensi sumber daya keuangan sebesar Rp 22,88%.

Gambar 3.9. Gubri H Arsyadjuliandi Rachman dan Wagubri H Wan Thamrin Hasyim Terima Audiensi Investor Jepang Tentang Inovasi Produk Kelapa Sawit di Ruker Wagubri



### SASARAN MENINGKATNYA LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dengan menggunakan Produk Domestik Regional Burto (PDRB), di mana jika persentase naik

hal itu berarti ekonomi daerah tersebut tumbuh.

Perekonomian Riau berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan III-2017 mencapai Rp 177,45 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 119,50 triliun.

Ekonomi Riau triwulan III-2017 tumbuh 2,85 persen (*y-on-y*). Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh hampir semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Jasa Perusahaan yang tumbuh 8,86 persen. Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga (PK-RT) yang tumbuh sebesar 4,26 persen.

Secara umum capaian Sasaran Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi belum dapat dicapai sesuai target dengan capaian hanya 84,07% dari target 3,39 yang ditetapkan. Akan tetapi capaian tersebut masih angka sementara pada Triwulan III dan akan mengalami peningkatan pada capaian triwulan IV.

Ekonomi Riau triwulan III-2017 dibanding triwulan III-2016 (*y-on-y*) tumbuh 2,85 persen. Pertumbuhan didukung oleh hampir semua lapangan usaha kecuali Pertambangan dan Penggalian; Pengadaan Listrik dan Gas; dan Jasa Keuangan dan Asuransi yang mengalami penurunan masing-

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA



masing sebesar 5,77 persen; 1,10 persen; dan 3,36 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Jasa Perusahaan sebesar 8,86 persen; diikuti Konstruksi sebesar 7,45 persen; dan Jasa Lainnya sebesar 7,27 persen.

Struktur PDRB Riau menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada triwulan III- 2017 menunjukkan sedikit perubahan. Pada triwulan III-2017, Industri Pengolahan berkontribusi paling tinggi terhadap pembentukan PDRB Riau yaitu sebesar 25,40 persen, diikuti Pertambangan dan Penggalian sebesar 25,07 persen dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 23,96 persen.

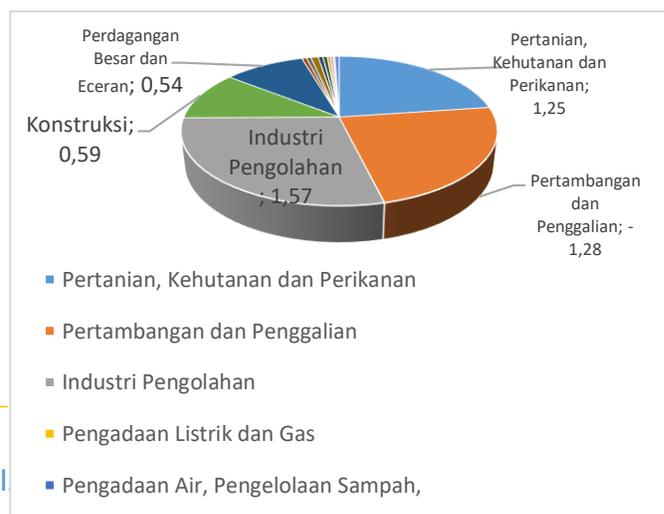
Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Riau triwulan III-2017 (*y-on-y*), Industri Pengolahan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,57 persen, diikuti Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 1,25 persen; Konstruksi sebesar 0,59 persen; dan Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 0,54 persen.

Secara spasial, pada triwulan III-2017 Provinsi Riau berkontribusi sebesar 5,00 persen. Provinsi Riau merupakan provinsi dengan PDRB terbesar ke-5 di Indonesia atau PDRB terbesar di Pulau Sumatera. Ekonomi Riau triwulan III-2017 tumbuh 2,85 persen (*y-on-y*). Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh hampir semua lapangan

usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Jasa Perusahaan yang tumbuh 8,86 persen. Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga (PK-RT) yang tumbuh sebesar 4,26 persen.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional masih rendah, Ekonomi Indonesia triwulan III-2017 terhadap triwulan III-2015 (*y-on-y*) tumbuh 5,02 persen, melambat dibanding triwulan II-2017 yang tumbuh 5,19 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh hampir semua lapangan usaha, dimana pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 9,20 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 6,65 persen diikuti oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto.

**Grafik 3.15. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen)**



# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA



Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Riau triwulan III-2017 (*y-on-y*), Industri Pengolahan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,57 persen, diikuti Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 1,25 persen; Konstruksi sebesar 0,59 persen; dan Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 0,54 persen.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau tidak terlepas dari peran Pemerintah dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah dan Swasta. Industri pengolahan menjadi penyumbang PDRB terbesar dengan 1,57%. Hal ini tidak terlepas dari peran Dinas Perindustrian Provinsi Riau dalam upaya meningkatkan sarana dan prasarana produksi hasil industri yang berbasis sumber daya alam daerah melalui pemberian bantuan barang dan peralatan produksi bagi IKM di Provinsi Riau.

Akan tetapi masih ditemui beberapa kendala dalam peningkatan peran industri dalam perekonomian di Provinsi Riau. Salah satunya belum optimalnya penataan struktur industri, sehingga hilirisasi produk industri masih terbatas, terutama dalam penyediaan infrastruktur kawasan yang dikait dengan RTRWP yang menjadi kendala dalam pengembangan berbagai kawasan maupun sarana pendukung lain; masih

rendahnya mutu dan kualitas produk industri yang dihasilkan oleh perajin usaha kecil dan menengah disebabkan terbatasnya keterampilan dan pengetahuan pengusaha IKM terhadap pemanfaatan teknologi dan mutu produksi sehingga menimbulkan lemahnya daya saing produk di pasar global maupun regional; dan masih relative terbatasnya pemanfaatan potensi komoditi daerah terutama kontinuitas bahan baku yang diolah oleh IKM, sebagai akibat dari masih rendahnya penguasaan ilmu dan teknologi pengolahan komoditi potensial tersebut, serta lemahnya koordinasi lintas sectoral dalam pengembangannya.

Untuk itu perlunya komitmen Pemerintah Provinsi Riau untuk pembangunan IHKS dalam penyelesaian RTRWP dalam rangka mengupayakan berbagai kawasan industri menjadi kawasan Strategis Nasional sehingga APBD Provinsi dan atau Kabupaten/Kota.

Adapun solusi lainnya adalah dengan memberikan pelatihan dan bimbingan teknis baik kepada pelaku usaha maupun kepada aparatur Pembina dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kualitas SDM, dengan mencanangkan Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Teknologi, khususnya pada bidang penguasaan teknologi pengolahan komoditi potensial; dan diperlukan sinkronisasi program antar OPD dalam pengembangan

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA



potensi unggulan daerah terutama memberikan dukungan kepada pengembangan wilayah industri yang ditetapkan berdasarkan hasil pengkajian memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan industri seperti Plintung di Dumai, Tanjung Buton di Siak dan Kuala Enok di Indragiri Hilir.

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA



### 3.2. ANALISIS EFISIENSI

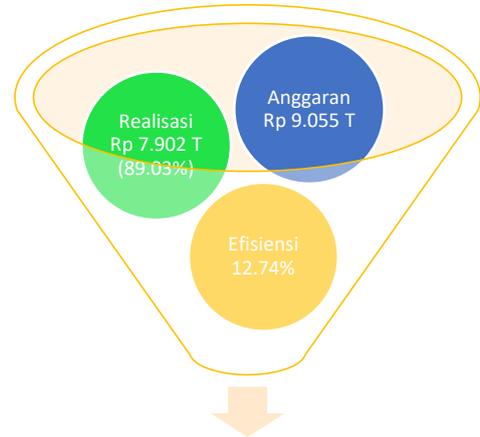
Setiap rupiah yang dibelanjakan harus mampu mendukung kinerja Pemerintah Provinsi Riau dan secara tidak langsung harus mampu menyejahterakan masyarakat Riau.

Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka semakin rendah tingkat efisiensinya, sebaliknya semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka semakin tinggi efisiensi anggaran yang dilakukan.

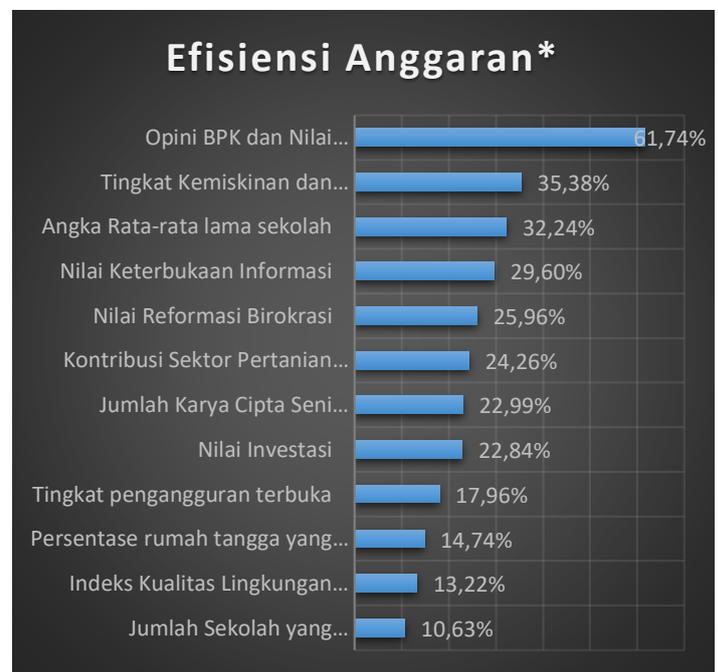
Adapun dalam rangka efisiensi anggaran dalam pencapaian sasaran kinerja Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2017 telah dilaksanakan upaya-upaya sebagai berikut.

- Pembatasan frekuensi dan jumlah peserta perjalanan dinas;
- Perjalanan Dinas hanya dilakukan untuk kegiatan yang tidak terhindarkan;
- Untuk kegiatan-kegiatan monitoring dan evaluasi sedapat mungkin menggunakan sarana teknologi informasi untuk berkomunikasi antar wilayah
- Pengelolaan rapat pembahasan yang tepat waktu dan terstandarisasi (antara lain kejelasan durasi rapat, tujuan rapat, dan penetapan peserta rapat yang berkompeten)
- Pembatasan pemberian honorarium tim pelaksana kegiatan dan narasumber bagi Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau khususnya tim kerja dan

narasumber yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang bersangkutan.



Capaian Sasaran Strategis Pemerintah Provinsi Riau



\*) : Efisiensi anggaran yang melebihi 10%

### 3.3 UPAYA PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA PROVINSI RIAU

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas Kinerja, Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut.

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA



1. Reivu Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah Provinsi Riau
2. Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Provinsi Riau yang dihadiri oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan pengawasan pada tanggal 8-9 April 2017



2. Pembinaan penyusunan pohon kinerja OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau



3. Pembinaan Penerapan Manajemen Kinerja Se Provinsi Riau pada tanggal 20 April 2017
4. Asistensi Pemantapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Riau



3. Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Kinerja Provinsi Riau

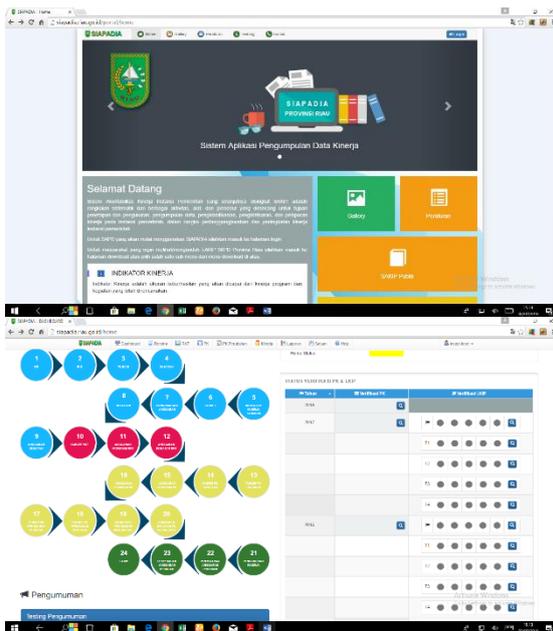
# BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



## 4. Pengukuran Kinerja OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau



## 5. Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Provinsi Riau yang berbasis IT



Sistem Akuntabilitas Kinerja Provinsi Riau telah menggunakan system “SIAPADIA”, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih belum dilakukan

upgrade sesuai dengan Revisi RPJMD Provinsi Riau Tahun 2017.

## 3.4. PENCAPAIAN KINERJA LAINNYA

### PEMBANGUNAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL

#### 1. PEMBANGUNAN JALAN TOL PEKANBARU-KANDIS-DUMAI

No	NAMA RUAS	PROGRES PENGADAAN LAHAN	PROGRES KONSTRUKSI
1	Seksi 1 Pekanbaru-Minas	68,23%	10,069%
2	Seksi 2 Minas-Kandis Selatan	41,09%	1,059%
3	Seksi 3 Kadis Selatan-Kandis Utara	74,68%	2,064%
4	Seksi 4 Kandis Utara-Duri Selatan	5,88%	0,00%
5	Seksi 5 Duri Selatan-Duri Selatan	57,93%	0,00%
6	Seksi 6 Duri Utara-Dumai	69,98%	0,00%
	Total	49,45%	

# BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



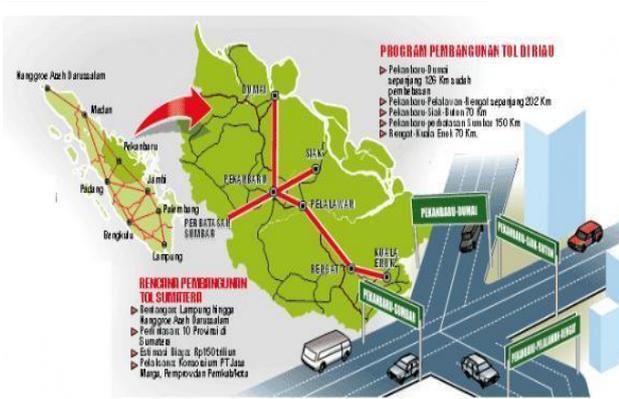
## PROGRES PETA BIDANG



- Status Pembebasan Tanah
  - a. Tanah Bebas = 7,700 km
  - b. Inventarisasi & Pengukuran Peta Bidang = 63,015 km
  - c. Belum Diukur = 60,760 km



## LAPORAN PROGRESS



### 2. PEMBANGUNAN KERETA API

Jalur Pekanbaru-Duri-Dumai sepanjang 187 Km

### 3. JARINGAN SUTET 500 KVA JAMBI-RIAU





#### 4. PEMBANGUNAN STP RIAU

Agenda prioritas NAWACITA ke-6, Sub Agenda ke-7 yaitu “Peningkatan Kapasitas Inovasi dan Teknologi” melalui pembangunan 100 Science Techno Park (STP) di Seluruh Indonesia melalui Kementerian Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan anggaran sebesar RP 118.252.680.737,- Melalui kegiatan tersebut telah dibangun Gedung Pengelola dan telah dilaksanakan kegiatan pengadaan peralatan pengolahan untuk workshop tenant.

Adapun pengembangan teknologi yang dilakukan diantaranya :

1. Produk pengolahan bahan baku perikanan air tawar
  2. Produk pengolahan bahan baku kelapa
  3. Produk pengolahan bahan baku nanas
  4. Produk pengolahan bahan baku sagu
- Sementara itu, rencana pembangunan

STP meliputi :

- a. Gedung tenant (12 gedung)
  - b. Gedung Pusat Informasi
  - c. Mess
  - d. Pembangunan jalan dan saluran kawasan
  - e. Pembangunan gerbang utama
  - f. Plaza, taman depan dan gazebo
  - g. Pembangunan IPAL dan penampungan limbah padat
  - h. Pembangunan pagar keliling kawasan
- Dengan kebutuhan dana sebesar Rp 35 Milyar.

#### 5. KAWASAN INDUSTRI DUMAI

Adapun potensi pengembangan kawasan industri di Kota Dumai adalah sebagai berikut.

- Pelabuhan utama di Provinsi Riau, Dumai sebagai daratan merupakan pintu gerbang penghubung daerah hinterland di Sumatera dan mempunyai pelabuhan internasional;
- Pulau Rumat sebagai salah satu wilayah di Kabupaten Bengkalis dan merupakan kawasan pantai yang luas berguna melindungi Kota Dumai sehingga laut/pelabuhan menjadi tenang;
- Pantai/Selat Dumai berbentuk melengkung, sehingga arus dari selat Malaka menyebabkan kolam laut dasar tergerus sehingga tidak ada sedimentasi dan mengakibatkan kondisi selat senantiasa bisa dilalui oleh kapal-kapal besar;
- Mempunyai kedalaman alur pelayaran rata-rata 15-20 M dan mampu dilakkan kapal dengan bobot 20-50 DWT
- Bibir pantai sepanjang 134 Km

Dumai juga memiliki potensi unggulan kawasan strategis, yaitu dua kawasan industri yang strategis yaitu Kawasan Industri Pelintung dan Kawasan Industri Lubung Gaung, dua kawasan pelabuhan yaitu Kawasan Pengembangan Pelabuhan Terpadu dan Kawasan Pelabuhan Pelindo I, dan Kawasan Industri Pengolahan Migas (PT. PErtaMina RU II dan OT. Chevron).

Disamping itu, kawasan indutri Dumai juga memiliki fasilitas yang lengkap

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA



diantaranya pelabuhan dengan kapasitas 50.000 DWT; pembangkit listrik dengan kapasitas 55 MW (Upgrade 100 MW); Instalasi air bersih kapasitas 750m<sup>3</sup>/jam; terminal kapasitas 210.000 MT; instalasi pengolah limbah kapasitas 150 m<sup>3</sup>/jam dan muatan/cargo dengan kapasitas 8.400 m<sup>2</sup>.

### 6. Proyek pembangunan infrastruktur jalan tol

- Jalan tol Pekanbaru-Bangkinang-Payakumbuh-Bukit Tinggi 185 Km
- Jalan Tol Jambi-Rengat 190 Km
- Jalan Tol Rengat-Pekanbaru 175 Km
- Jalan Tol Dumai-Sp. Sigambal\_rantau Prapat 175 Km

### 7. Proyek Pembangunan Saran dan Prasarana Kereta Api Antar Kota (Rantau Prapat-Duri-Pekanbaru)

### 8. Program Pembangunan kilang minyak (Upgrading kilang-kilang eksisting/RDMP)

### 9. Proyek Bendung dan Jaringan Irigasi (Bendungan ROkan Kiri)

### 10. Proyek Pembangunan Kawasan Industri Prioritas/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

- Kawasam Industri Dumai
- Kawasan Industri tanjung Buton

### 3.5. PENGHARGAAN/PRESTASI PROVINSI RIAU S.D 2017



1. PENILAIAN AKUNTABILITAS KINERJA PROVINSI RIAU TAHUN 2017 TERMASUK KATEGORI B DENGAN NILAI 66,50
2. MEMPERTAHANKAN OPINI BPK PENILAIAN WTP 2014-2016
3. PELAYANAN PUBLIK DPMPSTP DENGAN PREDIKAT A- BERSAMA DPMPSTP DKI JAKARTA

#### PENGHARGAAN

- Juara I Nasional Kategori Kader BKB Tahun 2015 dari BKKBN.
- Penghargaan ISO 9001-2015 untuk Perlindungan Perempuan dan Anak oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).
- Penghargaan Terbaik se Indonesia untuk Pengelolaan Data Bencana dan Pusdalops Tahun 2016 terhadap BPBD Provinsi Riau.
- BKN Award Kategori Implementasi Assesment Centre peringkat III Nasional Tahun 2016.
- Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2016 sebanyak 36 Sekolah dari Kementerian LHK.

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA



- Penghargaan Bidang Pembinaan Keselamatan Kerja (K3) tahun 2016 dari Kemenakertrans.
- Juara II Nasional Kategori Kelompok BKR Tahun 2016 dari BKKBN.
- Anugerah Bintang Veteran Tahun 2016 dari Legiun Veteran.
- Anugerah BUNDA PAUD Tingkat Nasional Tahun 2016 untuk Ibu Gubernur dari Presiden Jokowi.
- *Procurement Award* pada Rakernas LPSE 2016 dengan Kategori Komitmen Penerapan Standar LPSE 2014 dan Kategori Inovasi LPSE.
- Juara I Nasional Kategori Kelompok BKL dan PIK Jalur Pendidikan Tahun 2016 dari BKKBN.
- Penghargaan Kementerian PUPR tahun 2017 dengan memiliki Perda tentang Bangunan Gedung di 12 Kab/Kota.
- Penghargaan Pramakarya Bidang Usaha dan Komitmen Pengembangan Kualitas dan Produksi UKM Tahun 2017.
- Penghargaan sebagai Pembina ProKlim tahun 2017 dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tk. Pratama Tahun 2016-2017 Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tingkat Pratama tahun 2017.
- Penghargaan Anugerah Budhipura 2017 dari Kemenristek.
- Penghargaan Balitbang berkinerja utama tahun 2017 dari Kemenristek.
- Penghargaan Penerapan Sistem Computer Assisten Test (CAT) dalam Seleksi CPNS Tahun 2017 dari Kemenkumham.
- Juara I Nasional Lomba Cipta Menu Kategori sarapan Pagi tahun 2017 dari Kementerian Pertanian.
- Penghargaan Provinsi Terbaik Nasional Panel harga Pangan tahun 2017 dari Kementerian Pertanian.
- Penghargaan Pembinaan dan Pemeriksaan Kesehatan Jamah Haji Tahun 2017 dari Kementerian Kesehatan
- Juara II Lomba Perpustakaan TK SMA Nasional Tahun 2017 dari Kementerian Pendidikan RI.
- Penghargaan Anugerah Kota Layak Anak sebagai Provinsi Terbaik dalam Provinsi Penggerak Pengembangan Kota Layak Anak tahun 2017 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).
- Penghargaan sebagai Provinsi Penggerak Forum Anak Tahun 2017 dari Kementerian PPPA.
- Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik dalam rangka Pengimplementasian UU Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2017 kategori OPD Provinsi.
- Penghargaan kepada Gubernur Riau sebagai Pembina K3 Tingkat Provinsi Tahun 2017 oleh Kemenakertrans.

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA



- □Dafa Award Kategori FA Provinsi Terbaik 1 Nasional dan Kategori Terbaik Bidang Lingkungan Tingkat Utama Tahun 2017 dari kementerian PPPA.
- □Penghargaan dari Universitas Gajah Mada (UGM) Jogjakarta sebagai Provinsi dengan Kondisi Keuangan Daerah Terbaik Tingkat Regional I Sumatera.
- □Juara Umum Sapta Pesona 2017 yang ditaja oleh Kementerian Pariwisata.
- □Juara II Nasional Kategori PIK R Jalur Pendidikan Tahun 2017 dari Kementerian Pendidikan.
- Peringkat 5 Olimpiade Sains Nasional 2017 di Provinsi Riau.
- Juara II Kategori Tingkat kebuntingan Kombinasi Antara Target Kontribusi dan Kebuntingan Tahun 2017 dari Kementerian Pertanian.
- Perhargaan Terbaik untuk Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) oleh Kemendagri.
- Penghargaan Pramakarya Bidang Produktivitas Tahun 2017 oleh Presiden RI.
- Dinas Kesehatan Provinsi Riau / Peringkat I Tingkat Nasional Dalam Ketepatan Dan Kelengkapan Alert Sistem Kewaspadaan Dini Dan Respon (SKDR) Tahun 2016 - Kementerian Kesehatan RI
- Dinas Kesehatan Provinsi Riau / Peringkat Baik Nasional Dalam Penilaian Kapasitas Sistem Informasi Kesehatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 - Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI
- Man I Kota Pekanbaru / Juara Iii Lomba Sekolah Sehat Tingkat Nasional Untuk Tingkat SMA/MAN Tahun 2016 - Kementerian Kesehatan RI
- Penghargaan Berkinerja Utama dalam Penguatan SIDA (Sistem Inovasi Daerah) tahun 2016 dari Ristekdikti terkait Inovasi Sagu
- Predikat Kepatuhan Standar Tinggi terhadap Standar Pelayanan Publik tahun 2016 dari Ombudsman.
- Penghargaan Pembina TOP BUMD Tahun 2016 dari APKASI (Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia) bekerjasama dengan Lembaga Riset dan Manajemen Terkemuka.
- Juara Favorit Lomba Masak Ikan Tingkat Nasional 2016.
- LKPP Award untuk Inovasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Tahun 2016 dan Penerapan Standar Pelayanan PBJ.
- Penghargaan sebagai Pembina Gerakan Indonesia Pintar tahun 2016 di Sektor Pendidikan.
- Juara IV Tingkat Nasional Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA



Seimbang dan Aman Berbasis  
Sumberdaya Lokal di Boyolali 2016.

- Juara Nasional Adikarya Pangan Nusantara Kategori Pelopor Pangan 2016.

## IV.1 Kesimpulan

Secara umum pencapaian kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2017 dapat dicapai sesuai target dengan 6 indikator kinerja termasuk dalam kategori **“Sangat baik”** dengan capaian kinerja melebihi 100% diantaranya pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar yaitu Rasio Elektifikasi, sasaran Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan pada Indikator Angka Rata-Rata Lama Sekolah, Indikator Gini Rasio, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indikator Nilai Reformasi Birokrasi, Indikator Jumlah Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Berbasis Budaya Melayu Sesuai Standar, Indikator jumlah Kunjungan Wisatawan Asing, dan Indikator Nilai Investasi PMA.

Ketercapaian tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dijalankan oleh OPD sesuai dengan pagu anggaran pada APBD Provinsi Riau Tahun 2017. Akan tetapi masih terdapat beberapa indikator kinerja yang tidak dapat dicapai dan berada dalam kategori **“Kurang”** diantaranya nilai keterbukaan informasi dan Jumlah Karya Cipta Seni Budaya yang dihasilkan (HAKI Karya Seni), hal ini terjadi dikarenakan kurangnya koordinasi antara bidang yang menangani keterbukaan informasi dengan Tim Penilai di Komisi Informasi Pusat sehingga Provinsi Riau tidak mengikuti Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2017. Sementara untuk Indikator jumlah Karya Cipta Seni Budaya Melayu yang diHAKIkan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan pada APBD Murni 2017 tidak ada kegiatan/rincian output kegiatan ataupun rincian rekening untuk melaksanakan pendaftaran HAKI dan penetapan HAKI membutuhkan waktu 4 s/d 18 bulan untuk penetapannya. Akan tetapi Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Kebudayaan telah menginventarisir 46 Karya Seni Budaya yang akan didaftarkan HAKI pada 2018.

Kekurangan yang terjadi selama tahun 2017 telah dicatat dan akan dievaluasi sebagai bahan untuk menyusun kebijakan operasional guna memperbaiki kinerja tahun 2017. Sasaran program yang belum tercapai akan dievaluasi agar kendala yang dihadapi dapat dicari solusinya sedini mungkin, sehingga seluruh sasaran program dapat dicapai dengan lebih baik dari tahun ke tahun.

Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar dapat diketahui kendala yang dihadapi dan risiko kegagalannya sedini mungkin dan dicari solusinya, sehingga visi dan misi Pemerintah Provinsi Riau dapat dicapai. Dari hasil Evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Riau dapat disimpulkan



bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada RPJMD di kategorikan rata-rata Baik.

### IV.2.Strategi Untuk Meningkatkan Kinerja Di Masa Mendatang

Strategi yang digunakan untuk meningkatkan capaian kinerja Pemerintah Provinsi Riau di masa mendatang diantaranya dengan beberapa langkah sebagai berikut :

1. Pengoptimalisasian program kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis Pemerintah Provinsi Riau;
2. Mensinkronkan program/kegiatan dengan Revisi RPJMD, Renstra dan Perjanjian Kinerja;
3. Penguatan Tim SAKIP Provinsi Riau dalam rangka peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Riau.
4. Menajamkan peran dan fungsi Bappeda dalam penyempurnaan Renstra dan Perjanjian Kinerja OPD;
5. Melakukan penataan ulang program dan kegiatan dengan mempertimbangkan keselarasan dengan kinerja yang ingin dicapai;
6. Memastikan bahwa Indikator Kinerja Utama yang telah disusun dijadikan alat ukur kinerja;
7. Meningkatkan pemanfaatan aplikasi sebagai sarana monitoring dan evaluasi oleh pimpinan;
8. Meningkatkan evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Riau;
9. Meningkatkan pemahaman dan keterlibatan pimpinan OPD terhadap penerapan manajemen kinerja organisasi;
10. Memanfaatkan informasi kinerja dan capaian kinerja dari organisasi sebagai ukuran pemberian *Reward* dan *Punishment*.



## GUBERNUR RIAU

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Jabatan : GUBERNUR RIAU

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pekanbaru,

2017

GUBERNUR RIAU

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	6
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar	Persentase rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air minum	89,16	1 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
		Rasio panjang jalan dalam kondisi baik	1.486,68	1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Rasio Elektrifikasi	82,33	1 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)	8,61	1 Dinas Pendidikan (Bappeda, BPS)
		Angka harapan lama sekolah	13,19	
3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	71,20	1 Dinas Kesehatan
				2 RSUD Arifin Achmad
				3 RSUD Petala Bumi
				4 RSJ Tampan (Bappeda, BPS)
4	Menurunnya tingkat kemiskinan dan tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat	Tingkat Kemiskinan	6,65	1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Gini Rasio	0,35	2 Dinas Sosial.
				3 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				4 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
				5 Dinas Ketahanan Pangan
				6 Dinas dukcapil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. (Bappeda, BPS)
5	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,85	1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa
				2 Dinas Sosial
				3 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				4 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
				BPS
6	Terwujudnya <i>good governance and clean government</i>	Opini BPK	WTP	1 BPKAD
				2 Inspektorat
				3 Bappeda
		Nilai Akuntabilitas	BB	1 Inspektorat, Bappeda dan Biro Organisasi
				2 Bappeda
				3 Sekretariat Daerah
		Skor LPPD	3,24	1 Sekretariat Dewan
				2 Inspektorat Daerah
				3 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
				4 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				5 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				5 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
				6 Satuan Polisi Pamong Praja
				7 Badan Pendapatan Daerah
		8 Badan Kepegawaian Daerah		
		9 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
		10 Badan Penghubung		
		11 Sekretariat Daerah		
		12 Badan Kesbangpol		
	Nilai Keterbukaan Informasi	40,43	1 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
			2 Sekretariat Daerah	
	Nilai Reformasi Birokrasi	38,63	1 Sekretariat Daerah	
7	Lestarnya keanekaragaman budaya dan kearifan lokal	Jumlah Karya Cipta Seni Budaya yang dihasilkan (HAKI Karya Seni)	30,00	1 Dinas Kebudayaan
		Jumlah Sekolah yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Berbasis Budaya Melayu Sesuai Standar	50,00	1 Dinas Pendidikan
8	Meningkatnya kerukunan hidup beraqama	Persentase penyelesaian konflik antar umat beraqama	100,00	1 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	6
9	Meningkatnya pembangunan sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan)	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	24,65	1 Dinas Tanaman pangan Holtikultura dan perkebunan.
		Nilai Tukar Petani (NTP)	103,95	2 Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan
				3 Dinas Kelautan dan Perikanan
				4 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
				(BPS, Bappeda)
10	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	58,23	1 Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
				2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				3 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
11	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan asing	Jumlah Kunjungan wisatawan asing	70.509	1 Dinas Pariwisata
12	Meningkatnya nilai investasi	Nilai Investasi PMDN (milyar rupiah)	10.955,61	1 Dinas Perindustrian
		Nilai Investasi PMA (juta USD)	1.015,53	2 Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM
				3 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
				4 (BPS, Bappeda)
13	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	3,39	1 Dinas Perindustrian
				2 Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
				3 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
				4 Dinas Perhubungan
				5 Badan penelitian dan Pengembangan. (Bappeda, BPS)

GUBERNUR RIAU

Dto

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX. (0761) 23256

**PEKANBARU**

**SURAT PERNYATAAN**  
**REVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2017**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Provinsi Riau untuk Tahun 2017 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi kinerja yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Provinsi Riau.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Provinsi Riau Tahun 2017 yang sudah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan hasil reviu, pengecualian pada masalah yang akan kami jelaskan dalam paragraf berikut, tidak terdapat penyebab yang menjadikan kami yakin bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2017 tidak disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan hasil reviu yang telah dilakukan diketahui bahwa penyusunan LKj IP Provinsi Riau Tahun 2017 telah cukup memadai sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 yang ditandai dengan:

- (1) Penyusunan telah dilakukan oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi terkait yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Riau No: 144/II/2017.
- (2) Penyajian setiap sasaran yang disajikan telah didukung dengan data resmi dari masing-masing OPD pelaksana.
- (3) Penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusunan LKj telah diatur dengan SOP, dan
- (4) Penyajian data kinerja atas Indikator Kinerja dan Indikator Kinerja Utama yang telah memenuhi kriteria indikator yang baik, namun masih dibutuhkan beberapa perbaikan dalam hal format, mekanisme penyusunan dan substansi laporan.

PENERIMAN  
INSPEKTORAT DAERAH

Format penyusunan LKj IP belum seluruhnya memiliki sistematika penyajian capaian kinerja yang dapat menjelaskan keterkaitan antara indikator, target, realisasi dan capaian kinerja dengan program/kegiatan, berikut kebutuhan anggaran dan realisasi keuangannya. Disamping belum seluruh perbandingan capaian kinerja diuraikan dalam uraian penulisan, juga masih terdapat penyajian target dan realisasi yang belum dilengkapi dengan ukuran satuan yang terukur.

Mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusunan LKj telah dilengkapi dengan SOP, dan setiap sasaran yang disajikan telah didukung dengan data resmi dari OPD terkait. Namun penyajian LKj IP bukanlah kompilasi LKj IP unit kerja dibawahnya, akan tetapi merupakan laporan atas Perjanjian Kinerja Gubernur Riau Tahun 2017 yang disusun berdasarkan data capaian Laporan Kinerja OPD.

Dalam hal substansi, masih ada indikator kinerja didalam LKj IP yang belum sesuai dengan indikator kinerja yang ada didalam Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama.

INSPEKTUR DAERAH PROVINSI RIAU



Drs. EVANDES FAJRI, AK., CA

Pembina Utama Muda

NIP 19641207 199203 1 010

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pelunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- 3) Surat Kepala Biro Organisasi, Sekretariat Daerah Provinsi Riau Nomor: 607/ORG/11/43 tanggal 27 Februari 2015 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Provinsi Riau Tahun 2017
- 4) Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Provinsi Riau Nomor 44/SPT/2013 tanggal 5 Maret 2013